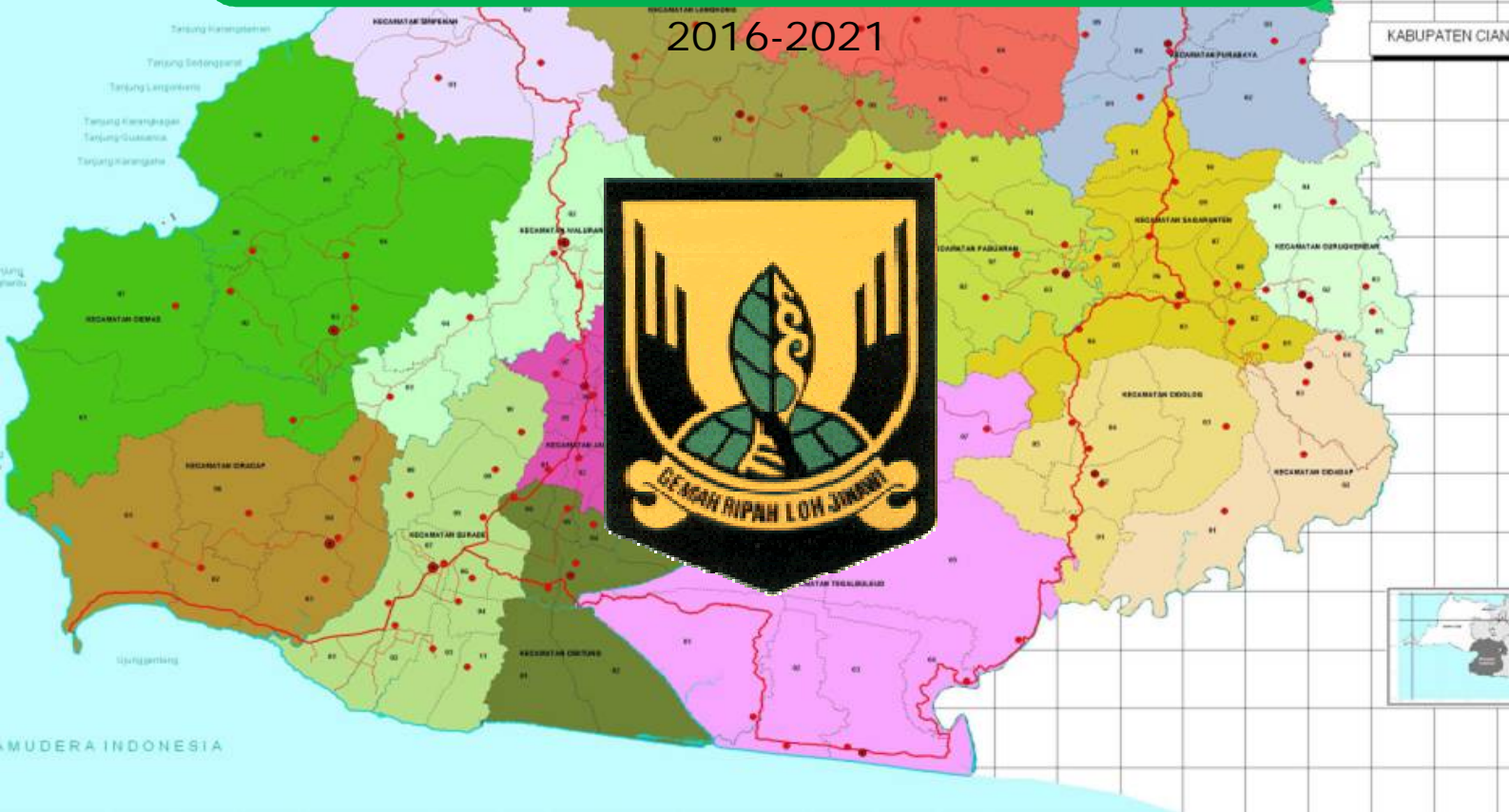




# RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021

**DINAS KETAHANAN PANGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rakhmat dan Hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi tahun 2016-2021 telah selesai di susun.

Rencana Strategis ini memuat tentang gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan sampai tahun 2021, baik perkiraan permasalahan yang dihadapi maupun rencana penanganannya. Rencana Strategis ini sangat diperlukan karena disamping memuat informasi prioritas pembangunan ketahanan pangan juga program maupun kegiatannya, hal ini sebagai pedoman dalam memberi arah penanganan pembangunan kemandirian pangan dalam rangka menanggualangi permasalahan pangan, meningkatkan, mengembangkan, memperbaiki serta memperbaharui hasil-hasil pembangunan di bidang ketahanan pangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategi ini jauh dari kata sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kami dimasa yang akan datang sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat khususnya bagi pelaksana kebijakan di bidang ketahanan pangan maupun masyarakat pada umumnya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rakhmat dan petunjuknya kepada kita semua, Aamiin.

Sukabumi,            Desember 2016

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SUKABUMI

**Ir.H.SUDRAJAT, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620422 198803 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan	9
2.2.1 Sumber Daya Manusia	9
2.2.2 Sarana dan Prasarana	11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	11
2.4 Kelompok Sasaran	12
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Ketahanan Pangan	25
2.5.1 Peluang (Opportunity)	25
2.5.2 Tantangan (Threat)	26
2.6 Gambaran Pelayanan BP4K	27
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.2.1 Visi	41
3.2.2 Misi	41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	45
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian	45
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi	46
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	47
3.5.1 Strategis yang Menggunakan Kekuatan Untuk Memanfaatkan peluang	57
3.5.2 Strategi yang Menggunakan untuk mengatasi ancaman	57
3.5.3 Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman	57
<b>BAB IV TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	59
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	59
4.1.1 Tujuan	59
4.1.2 Sasaran	59
4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan	61

4.2.1 Strategi Dinas Ketahanan Pangan	61
4.2.2. Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan	62
4.2.3. Fakta Integritas Skala Prioritas Dinas Ketahanan Pangan	63
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	41
5.1 Program Dinas Ketahanan Pangan	64
5.2 Pendaan Indikatif	66
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	77
<b>BAB VII PENUTUP</b>	81
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Pencapaian tujuan sesuatu organisasi yang dikelola secara modern hanya dapat dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Dalam sebuah organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi fungsi perencanaan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan pangan, Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di masa mendatang masih memegang peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, karena kontribusinya yang nyata terhadap peningkatan produksi, penyedia bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, Produk Domestik Bruto (PDB), sumber devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelestarian lingkungan hidup.

Perencanaan menurut dimensi waktu dapat dikelompokkan ke dalam perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang perlu disusun untuk dipedomani di dalam menyusun perencanaan jangka pendek, menyadari hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan mengimplementasikan penyusunan perencanaan jangka panjang dalam sebuah dokumen perencanaan strategis. Tuntutan adanya pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan terhadap pembangunan ekonomi dibutuhkan SDM yang profesional, inovatif, kreatif, dan berwawasan global perlu dirumuskan Rencana Dinas Ketahanan Pangan tahun 2016 - 2021 secara sistematis, terpadu dan terukur.

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan. Dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi. Maka Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyiapkan bahan koordinasi untuk kewaspadaan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi yang mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun. Dimana dalam penyusunan Renstra ini harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra berfungsi untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala dan merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan oleh Perangkat Daerah (PD) hingga 5 (lima) tahun mendatang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah – Pusat dan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
26. Pemerintah Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);



29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Barat 2008-2013;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13)  
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
37. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan;
38. Peraturan Mentreri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan Program Penyuluhan Perikanan;
39. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;

41. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, adalah untuk menyediakan dokumen rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah (PD) sebagai acuan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, informasi lokasi dan kelompok sasaran yang tepat, dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, serta untuk memberikan arah bagi pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam program dan kegiatan beserta besaran dan tahapan pencapaiannya, sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi adalah :

1. Terformulasinya program dan kegiatan sebagai acuan dalam pembangunan ketahanan pangan agar Dinas Ketahanan Pangan dapat proaktif mengantisipasi perubahan yang terjadi, mendiagnosa secara objektif keberhasilan yang dicapai dengan berwawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi pelaku (*stakeholder*), serta *fleksibel*, melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi;
2. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara sistematis, terpadu dan terukur;
3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk AKIP, LAKIP maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

#### **1.4. Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi / Kabupaten
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

#### **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

#### **BAB VII. PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan dan Sub urusan penyuluhan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten sukabumi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan bidang kelembagaan dan penyuluhan;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan bidang kelembagaan dan penyuluhan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan bidang kelembagaan dan penyuluhan;
- d) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan bidang kelembagaan dan penyuluhan;
- e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesekretarisan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan bidang kelembagaan dan penyuluhan;

- f) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kesekretarisan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan dan bidang kelembagaan dan penyuluhan;
- g) Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;
- h) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- k) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- l) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

#### A. Aspek SDM DKP

Tabel 2.1 Matrik Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan

No	Uraian Pegawai	Jumlah
1	Struktural	17 Orang
2	Fungsional Penyuluh	124 Orang
3	THL TBPP	113 Orang
4	THL TBPPD	59 Orang
5	TKS	22 Orang

#### A. Aspek Pelaku Utama

Pelaku utama pada kegiatan penyuluhan adalah para petani atau pelaku agribisnis, agroforestry serta pembudidaya ikan dan nelayan. Jumlah keseluruhan pelaku utama 151.366 KK yang tergabung dalam 3.806 kelompok dan 350 Gapoktan.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukabumi tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi mencapai angka 2.422.133 orang. Angka keluarga Pra



Sejahtera sampai dengan tahun 2014 tercatat 9,7 %, data pencari kerja pada tahun 2014 sebanyak 27.000 orang.

Pelaku utama pertanian adalah para petani / pelaku agribisnis di Kabupaten Sukabumi dengan mata pencaharian sebagai petani padi dan palawija, petani sayuran dan buah-buahan, peternak dan perkebun.

Jumlah pelaku utama di Kabupaten Sukabumi sebanyak 140.383 KK, dengan tingkat pendidikan pelaku utama petani padi palawija, peternak dan pekebun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Matrik Keragaan Pelaku Utama Berdasarkan pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat dan Tidak Tamat SD	76%
2.	Tamat SMP	15,26%
3.	Tamat SLTA	8,17%
4.	Tamat Perguruan Tinggi	0,47%

**Tabel II.3 Tingkat Pendidikan Pelaku Utama Pertanian**

Kepemilikan lahan pelaku utama pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Matrik Keragaan kepemilikan Lahan Pelaku Utama

No	Kepemilikan lahan	Jumlah Petani
1.	> 0,25 ha	102.187 Orang
2.	0,25 – 0,5 ha	77.373 Orang
3.	0,5 – 1,0 ha	259.969 Orang
4.	> 1 ha	26.205 Orang

**Tabel II.4 Kepemilikan Lahan Pelaku Utama Pertanian**

Tabel 2.4. Matrik Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija

No	Jenis Tanaman	Produktivitas (Ton/ha/thn)	Keterangan
1.	Padi	932.771	
2.	Jagung	34.993	
3.	Kedelai	18.127	
4.	Kacang Tanah	9.478	
5.	Ubi Kayu	165.520	
6.	Ubi Jalar	18.093	
7.	Jahe	1.658	
8.	Temu Lawak	674	

9.	Tomat	27.559	
10.	Kentang	164	
11.	Cabe	137.047	

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Matrik Keragaman sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan

N O	Uraian	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
<b>1</b>	<b>Gedung Kantor</b>				
	- BP4K	1	1	-	-
	- BP3K	47	44	1	2
<b>2</b>	<b>Kendaraan Dinas</b>				
	- Roda Empat	6	6		-
	- Roda Dua	257	136	31	90

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dalam rangka pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, maka upaya yang akan dilakukan dalam rangka menjamin ketahanan pangan antara lain dilakukan melalui : 1) pengembangan desa mandiri pangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya, 2) menjamin ketersediaan energi minimal 2.200 kal/kap/hari dan ketersediaan protein 57 gr/kap/hari dan penyediaan cadangan pangan pemerintah dalam rangka penyediaan pangan pada saat terjadi rawan pangan transien maupun rawan pangan kronis, 3) peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui program percepatan diversifikasi konsumsi pangan, 4) menjaga stabilisasi harga pangan khususnya gabah/beras melalui penyediaan Bantuan Sosial, dan 5) peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan melalui upaya revitalisasi ditingkat masyarakat guna menunjang ketahanan pangan.

Sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan PERMENTAN No. 65/ Permentan/ OT.140 /12/10 tentang SPM Bidang Ketahanan

Pangan Propinsi dan Kabupaten / Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak.

Sedangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas 7 (tujuh) jenis pelayanan dasar berikut :

1. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita 90% ;
2. Penguatan Cadangan Pangan 60% ;
3. Ketersediaan Informasi, Harga dan Akses Pangan di 90% ;
4. Stabilitas Harga Pasokan Pangan 90% ;
5. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan 90% ;
6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan 80% ;
7. Penanganan Rawan Pangan 60% (SPM BP4K) .

Sedangkan Indikator Kinerja (IKK) berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pada lampiran 1 untuk ketahanan pangan ada dua, yaitu adanya regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama.

#### **2.4. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dalam setiap jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan berbeda-beda yaitu :

1. Dalam rangka pengembangan desa mandiri pangan, kelompok sasaran yang akan menerima manfaat adalah KK miskin yang tergabung dalam kelompok afinitas yang diberdayakan melalui pembinaan dan pemberian bantuan sosial, serta mengintegrasikan berbagai program lintas sektor pada lokasi desa mandiri pangan,

2. Dalam rangka penyediaan pangan, sasaran pelaksanaan kegiatan adalah instansi teknis penanggungjawab target produksi dimana dilakukan melalui forum Dewan Ketahanan Pangan, sehingga target-target produksi yang telah ditetapkan dapat tercapai,
3. Upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat antara lain dilakukan kepada kelompok sasaran pada kelompok-kelompok wanita, PKK, serta pelaku usaha dan para pengambil kebijakan, serta advokasi melalui media masa dan melalui peningkatan pengetahuan bagi anak usia dini pada SD/Mi, sehingga diharapkan pemahaman tentang pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman akan dapat dikenal lebih luas,
4. Guna menjaga stabilisasi harga gabah/beras dilakukan melalui pengembangan program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dengan memberikan bantuan sosial kepada Gapoktan untuk membeli gabah anggota gapoktan sesuai HPP pada saat panen raya dimana sering harga dibawah HPP,
5. Dalam upaya peningkatan peran kelembagaan ketahanan pangan, selain kelembagaan struktural dan fungsional kelompok sasaran pengembangan kelembagaan ketahanan pangan adalah kelompok tani, kelompok masyarakat antara lain PKK, Posyandu, Dasawisma dan kelembagaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung pembangunan ketahanan pangan.

Program dan kegiatan bidang ketahanan pangan merupakan kegiatan yang selalu bersentuhan masyarakat, baik pembinaan maupun bantuan sosial modal usaha bersama yang mana bertujuan agar pendapatan masyarakat tani dan keluarganya dapat meningkat, yang sangat diharapkan dapat mandiri setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk bidang ketahanan pangan.

### **Situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Sukabumi**

1. Ketersediaan energi dan protein per kapita

Terpenuhinya kebutuhan penyediaan pangan penduduk disuatu wilayah

dapat ditunjukkan oleh dimensi kuantitatif yaitu berdasarkan energi dan zat gizi tiap orang tiap hari. Pangan yang tersedia dikatakan memenuhi kebutuhan penduduk jika energinya mencapai angka 2,200 kkal/Kapita/hari dan proteinnya 57 gram/kapita/hari, Menurut Situasi ketersediaan Energi di Kabupaten Bandung pangan berdasarkan Perhitungan Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kabupaten Sukabumi oleh Dinas Ketahanan Pangan bahwa data Ketersediaan energi dan protein per kapita pada akhir Tahun 2015 mencapai 4.123/kkal/kapita/hari. Dengan proteinnya 280,2 gram/kapita/hari hal ini sudah melampaui target dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

## 2. Penguatan cadangan pangan

Upaya mencapai ketahanan pangan berkelanjutan selama ini melalui pendekatan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan tingkat rumah tangga atau individu tergantung aksesibilitasnya terhadap pangan. Kecukupan pangan pada tingkat makro belum menjamin kecukupan pangan setiap individu atau rumah tangga. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat dipenuhi dari produksi dan cadangan pangan sendiri. Penguatan Cadangan Pangan terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Cadangan Pangan bertujuan untuk meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu di setiap tingkatan wilayah, menjaga stabilitas harga pangan dan meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada terisolir dan / dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2015 sebanyak 30 ton. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikuasai atau dikelola oleh masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang dan industri rumah tangga. Salah satu bentuk kelembagaan cadangan pangan masyarakat adalah Lumbung Pangan.

Pada Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Sukabumi telah mendapat bantuan keuangan untuk optimalisasi ketahanan pangan berupa fasilitasi lumbung pangan perdesaan yang merupakan dana bergulir antar anggota atau antar kelompok untuk pengembangan usaha lumbung pangan perdesaan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.400.000.000,- untuk 28 kelompok lumbung pangan tersebar di 14 kecamatan, dan pada tahun 2014 mendapat APBD Provinsi sebesar Rp. 1.900.000.000,- untuk 38 kelompok Lumbung Pangan Masyarakat tersebar di 16 kecamatan, setiap kelompok mendapat Rp. 50.000.000,- dengan rincian 30.000.000,- untuk pembelian gabah dari anggota kelompok tani dan masyarakat sekitar untuk cadangan pangan sedangkan untuk pembangunan lumbung pangan Rp. 20.000.000,- .

**A. Tabel : Penerima Bantuan Keuangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2013**

No	Kelompok Lumbung	Desa	Kecamatan
1	Tani Pasir Ipis	Kadaleman	Surade
2	G. Jagamukti	Jaga Mukti	Surade
3	Tani Jaya	Surade	Surade
4	Pasir Malang	Kadaleman	Surade
5	Ciguling	Gunung Sungging	Surade
6	Tani Mandiri	Cibadak	Pabuaran
7	Rik-Rik	Ciwalat	Pabuaran
8	Darma Mulia	Ujunggenteng	Ciracap
9	Tabah Barokah	Pangumbahan	Ciracap
10	Sumber Mekar	Karang Tengah	Cibadak
11	Caringin Jaya	Neglasari	Cibadak
12	Rempoeg Tani	Karang Tengah	Cibadak
13	Binangkit II	Balekambang	Nagrak
14	Tani Mekar	Pada Jaya	Jampang Kulon
15	Maju Jaya	Cileungsing	Cikakak
16	Tunas Tani	Cimaja	Cikakak
17	Tani Maju	Pondok Kaso Tengah	Cidahu
18	Endah Padi	Jaya Bakti	Cidahu
19	Tani Subur	Sukamaju	Kadudampit
20	Ranca Sejahtera	Palabuhanratu	Palabuhanratu
21	Bina Usaha	Pulosari	Kelapanunggal
22	Mekar Harapan	Pulosari	Kelapanunggal
23	Tani Sinagar	Gunung Endut	Kelapa Nunggal



24	Mitra Tani Cihurip	Cihurip	Cibitung
25	Layungsari	Talaga Murni	Cibitung
26	Mekarjaya	Nyalindung	Nyalindung
27	Ranca Bereum	Tegalbuleud	Tegalbuleud
28	Bunisari	Rambay	Tegalbuleud

**B. Tabel : Penerima Bantuan Keuangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2014**

No	Kelompok Lumbung	Desa	Kecamatan
1	Tani Silih Asih	Nangka Koneng	Cikidang
2	Citamiang	Gunung Malang	Cikidang
3	Tani Rahayu	Bojongsari	Jampangkulon
4	Padasuka	Cikarang	Jampangkulon
5	Mekarmukti	Mekarjaya	Jampangkulon
6	Berkah	Bojong Tugu	Curugkembar
7	Karya Tani 3	Lembursawah	Pabuaran
8	Harapan Tani	Cibadak	Pabuaran
9	Wanaasih	Ciwalat	Pabuaran
10	Sukarajin	Pabuaran	Pabuaran
11	Mukti Jaya	Sukajaya	Pabuaran
12	Mucekil	Ciracap	Ciracap
13	Imarotul Ummahat	Mekarsari	Ciracap
14	Sumur Tujuh	Pasirpanjang	Ciracap
15	Maju Bersama	Purwasedar	Ciracap
16	Jaya	Pangumbahan	Ciracap
17	Simpenan	Purwasedar	Ciracap
18	Bina Tani	Pasir Panjang	Ciracap
19	Sumber Pangan	Gunung Bayu	Ciracap
20	Teladan	Caringinunggal	Waluran
21	Legok Dadap	Waluran	Waluran
22	Leuwi Mukti	Loji	Simpenan
23	Tangkil	Wangunjaya	Ciambur
24	Karya Mukti IV	Munjul	Ciambur
25	Sukamanah	Bojong	Kalibunder
26	Leuwi Cagak	Cependeuy	Surade
27	Cilalay Bodas	Citanglar	Surade
28	Cinangsi	Wanasari	Surade
29	Cidadap 2	Jagamukti	Surade
30	Karya Tani	Banyuwangi	Cibitung
31	Harapan Tani	Cibodas	Cibitung
32	Mekar Tani	Talagamurni	Cibitung
33	Sari Tani	Cihanjawar	Nagrak
34	KWT Citra Lestari	Nagrak Utara	Nagrak

35	Putra Desa	Langkap Jaya	Lengkong
36	Karya Mukti	Padaseneng	Cidadap
37	Saribumi	Muara Dua	Kadudampit
38	Gemar Motekar	Cibenda	Ciemas

Pada Tahun 2015 Kabupaten Sukabumi mendapat alokasi pembangunan fisik lumbung pangan masyarakat dan rantai jamur sumber dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sebanyak 8 (delapan) lokasi diantaranya :

No	Kelompok Rantai Jamur	Desa	Kecamatan
1	Panca Nitih	Karangpapak	Cisolok
2	Tangkil	Wangunjaya	Ciandar
3	Harapan Tani	Cibadak	Pabuaran
4	Mukti Jaya	Sukajaya	Pabuaran
5	Warungwaru	Purwasedar	Ciracap
6	Sahabat Tani	Sekarsari	Kalibunder
7	Nagrah	Ciracap	Ciracap
8	Sumber Tani	Undrusbinangun	Kadudampit

Tabel : Gudang Cadangan Pangan (DAK) tahun 2015

No	Kegiatan	Lokasi
1	Gudang Cadangan Pangan	Desa Sukamulya Kecamatan Cikembar

### 3. Ketersediaan informasi harga dan akses pangan

Harga dan pasokan pangan merupakan indikator - indikator strategis yang saling terkait, yang dapat digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Gejolak harga pangan dapat menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Gejolak harga pangan dapat menyebabkan timbulnya gejolak social dan mengakibatkan terganggunya kondisi social politik nasional. Untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan diperlukan suatu sistem deteksi dini serta kebijakan penanganan gejolak harga pangan yang cepat dan tepat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan berkesinambungan melalui ketersediaan informasi harga. Kabupaten Sukabumi memiliki 3 (tiga) orang petugas pemantau harga yang harus mengumpulkan data

harga dan pasokan komoditas pangan strategis di Kabupaten yang diperoleh dari pasar-pasar kecamatan dan mengirimkan laporan harga 11 (sebelas) komoditas setiap minggu melalui SMS Center.

Tabel : Nama Enumerator

No	Nama	Enumerator	Wilayah Pantauan	Komoditas
1	Hermamat	Produsen	Kec. Simpenan Kec. Cisolok Kec. Palabuhanratu	Harga GKP,GKG, Cabe Merah Keriting, Bawang Merah, Beras Medium, Beras Pemium
2	Bayu Ginanjar	Produsen	Kec. Nagrak Kec. Cikembar Kec. Jampangkulon	Harga GKP,GKG, Cabe Merah Keriting, Bawang Merah, Beras Medium, Beras Pemium
3	Erik Rinaldi	Pedagang	Pasar Cibadak	Beras : Premium, Medium, Termurah. Jagung, Kedelai,Gula Pasir, Bawang Merah, Cabe Merh Keriting, Daging Ayam, Telur Ayam, Daging Sapi, Terigu, Minyak Goreng Curah tingkat eceran dan grosir

Pada Tahun 2015 kegiatan analisis akses pangan di Kabupaten Sukabumi belum dilaksanakan. Analisis akses pangan tersebut merupakan gabungan atau komposit dari berbagai indikator yang sudah ditentukan, dimana indikator tersebut bersifat tahunan yang meliputi indikator fisik, ekonomi dan sosial. Analisis situasi akses pangan menggambarkan kondisi akses pangan di suatu wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan maupun wilayah desa. Untuk itu tahun-tahun ke depan perlu dilakukan analisis akses pangan melalui pemantauan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.

#### 4. Stabilitas harga dan pasokan pangan

Terwujudnya Stabilitas harga dan pasokan pangan merupakan dampak dari kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) khususnya di wilayah gapoktan. Kabupaten

Sukabumi melalui hingga akhir Tahun 2015 mendapatkan Dana Bantuan Sosial Kegiatan Penguatan LDPM sebanyak 10 Gapoktan adalah sebagai berikut :

No	Gapoktan	Desa	Kecamatan	Tahun
1	Intan Tani Maju	Tugubandung	Kabandungan	2009
2	Bantarpeteuy	Cidahu	Cibitung	2009
3	Citra Alam	Nagrak	Nagrak	2009
4	Margaluyu	Margaluyu	Sukaraja	2009
5	Karya Mukti Mandiri	Tegalbuleud	Tegalbuleud	2010
6	Mekar Tani	Cihaur	Simpenan	2010
7	Tani Mukti	Mandrajaya	Ciemas	2012
8	Kadaleman	Kadaleman	Surade	2013
9	Mitratani	Bojongsari	Jampangkulon	2015
10	Raharja	Padasenang	Cidadap	2015

Kegiatan Penguatan LDPM merupakan kegiatan strategis, karena dimaksudkan untuk menjaga stabilisasi harga di tingkat petani pada saat menghadapi panen raya dan meningkatkan akses pangan anggota Gapoktan pada saat musim paceklik. Pada kegiatan Penguatan LDPM pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang mengenai perkembangan keuangan dan kegiatan dalam pengelolaan usaha distribusi (jual beli gabah/beras/jagung) dan pengelolaan cadangan pangan kepada Tim Teknis Kabupaten secara tertulis setiap bulan, sedangkan laporan untuk kegiatan pembelian/penjualan, harga, sisa barang dan pengadaan penyaluran cadangan pangan dilaporkan melalui SMS center setiap minggu pada hari Senin ke Nomor 0813 808 29 555. Tim Teknis Kabupaten membuat laporan kepada Tim Pembina BKPD Provinsi Jawa Barat setiap 2 bulan.

Tabel : Data LAPM

No	Gapoktan	Desa	Kecamatan	Tahun
1	Sugih Mukti	Tanjungsari	Curugkembar	2013
2	Gelar Harapan	Cimenteng	Curugkembar	2013
3	Lingkungsari	Sindangjaya	Curugkembar	2013
4	Mekarjaya	Nagrakjaya	Curugkembar	2013

Hasil Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan MWA adalah sebagai berikut :

Indikator distribusi pangan mencakup persepsi pelaku pasar dan perubahan harga pangan. Pelaku pasar mempersepsikan adanya kendala distribusi karena infrastruktur jalan yang kurang baik, ketidakstabilan biaya operasional, persaingan harga, serta ketidakstabilan stok. Sementara itu perubahan harga pangan cenderung fluktuatif, khususnya pada daging ayam ras yang laju perubahan harganya lebih dari 25% ketika menjelang hari raya keagamaan. Kenaikan harga tertinggi pada komoditas beras terjadi antara bulan April-Mei dan antara bulan Juli-Agustus di tingkat pengecer, sedangkan di tingkat grosir terjadi antara bulan Juli-Agustus. Komoditas telur ayam ras mengalami kenaikan harga tertinggi antara bulan Maret-Mei dan antara bulan Juli-Agustus di tingkat pengecer maupun di tingkat grosir. Komoditas daging ayam ras mengalami kenaikan harga tertinggi antara bulan April-Mei dan antara bulan Juli-Agustus di tingkat pengecer maupun di tingkat grosir.

Melalui Program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / Toko Tani Indonesia (TTI) dari Kementerian Pertanian program Toko Tani Indonesia merupakan salah satu upaya mengendalikan harga produk pertanian sehingga petani dan masyarakat selaku konsumen tidak dirugikan. Toko Tani Indonesia akan memperpendek rantai dagang dengan cara membeli produk pertanian langsung pada petani dan menjual langsung pada konsumen akhir, dengan cara Toko Tani akan membeli hasil panen petani diatas harga pasar dan menjual pada konsumen akhir dibawah harga pasar. Dengan Kondisi harga tersebut akan menguntungkan petani dan konsumen sehingga harga terkendali. Kabupaten Sukabumi mendapatkan bantuan tersebut untuk 3 Gapoktan dengan lokasi tersebar di 5 kecamatan.

Tabel : DATA PUPM/TTI

No	Gapoktan	PUPM/TTI	Lokasi	Kecamatan
1	Citra Alam	PD. Barokah Kios Barokah	Pasar Cibadak Wangun	Cibadak Nagrak
2	Kadaleman	Jasa Tani PD. Sari TAni	Pasir Ipis Kadaleman	Surade
3	Bantar Peteuy	Toko Budi Toko Tani Mukti	Kp. Banatarpeteuy CInagen Ds. Nagrak	Cidahu Jampangkulon

## 5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) disusun setiap satu tahun sekali skor PPH ketersediaan pada tahun 2015 sebesar 93,3 ini berarti sudah mencapai maksimal 90. Tetapi masih terjadi Gap hal ini disebabkan kelompok padi-padian masih mendominasi kontribusi PPH. Sementara skor PPH untuk kelompok buah pangan hewani, buah biji / berminyak serta sayur dan buah belum mencapai skor PPH ideal terlihat dalam tabel :

Tabel : Pola Pangan Pangan (PPH) Ketersediaan berdasarkan Data NBM

No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hari	Energi			Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					Skor PPH
			kcal	%	%A KE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AK E	Skor Maks	Gap	
1	Padi-padian	640.8	2311	56.0	105.0	0,5	28.0	52.5	25.0	27.5	25.0
2	Umbi-umbian	178.3	232	5.6	10.6	0,5	2.8	5.3	2.5	2.8	2.5
3	Pangan Hewani	1362.5	1121	27.2	51.0	2.0	54.4	102.0	24.0	78.0	24.0
4	Minyak dan Lemak	0.6	5	0.1	0.2	0.5	0.1	0.1	5.0	-4.9	0.1
5	Buah/Biji Berminyak	0.0	0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
6	Kacang-kacangan	32.2	127	3.1	5.8	2.0	6.2	11.6	10.0	1.6	10.0
7	Gula	20.4	76	1.8	3.4	0.5	0.9	1.7	2.5	-0.8	1.7
8	Sayur dan Buah	486.2	251	6.1	11.4	5.0	30.4	57.0	30.0	27.0	30.0
9	Lain-lain	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>Total</b>		4,123	100	187.4		122.8	230.1	100	130	<b>93.3</b>



No	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hari	Energi			Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)					Skor PPH
			kcal	%	%AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap	
1	Padi-padian	392.9	1.563.1	78.5	78.2	0,5	39.3	39.1	25.0	0.0	25.0
2	Umbi-umbian	34.0	41.6	2.1	2.1	0,5	1.0	1.0	2.5	-1.5	1.0
3	Pangan Hewani	96.0	180.5	9.1	9.0	2.0	18.1	18.0	24.0	-6.0	18.0
4	Minyak dan Lemak	30.1	270.9	13.6	13.5	0.5	6.8	6.8	5.0	0.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	1.3	7.6	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	1.0	-0.8	0.2
6	Kacang-kacangan	19.5	36.8	1.9	1.8	2.0	3.7	3.7	10.0	-6.3	3.7
7	Gula	10.5	38.8	1.9	1.9	0.5	1.0	1.0	2.5	-1.5	1.0
8	Sayur dan Buah	235.2	102.9	5.2	5.1	5.0	25.8	25.7	30.0	0.0	25.7
9	Lain-lain	54.0	30.3	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total		2.272.5	114.2	113.6		96.0	95.5	100.0	130	79.6

No	Uraian	Satuan	Ideal	Skor Pola Pangan Harapan			
				2012	2013	2014	2015
1	Energi	Kkal/kap/hari	2400	-			4,123
2	Protein	Gr/kap/hari	57	-			280,2
3	PPH Ketersediaan	Poin	90	-	76,7	85,5	93,3
4	PPH Konsumsi	Point	90	-	65,5	79,6	79,6

## 6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Melaksanakan pembinaan mutu dan keamanan pangan skala kecil / rumah tangga pada kelompok produsen serta melaksanakan pembinaan penerapan standar Batas minimum Residu pada tahun 2015. Berikut nama kelompok yang telah di beri sertifikasi Prima 3.

No	Kelompok	Lokasi	Komoditi
1	Ruswandi	Kelompok Tani Jaya, Kp. Ciburial RT. 03/06, Ds Pangumbahan, Kec. Nagrak	Bawang Merah
2	Ima Subirma	Ds. Bojong, Kecamatan Cikembar	Manggis
3	Ivo Sumilah	Kp. Babakan, Ds. Babakan Jaya, Kecamatan Parung	Jamur Tiram
4	Iwan Sugandi	Ds. Sukamaju Kecamatan Sukalarang	Cabai Merah
5	Engkus Kusnadi	Ds.Ciengang Kecamatan Geger Bitung	Cabai Merah
6	Ujang Nuryaman	Ds. Cipetir Kecamatan Kadudampit	Bawang Daun
7	Saefuloh	Ds. Cipamingkis. Kecamatan Cidadap	Temulawak
8	Maman	Ds. Pangumbahan KP. Batunamprak Rt 04/09 Kecamatan Ciracap	Bawang Merah
9	Amin	Ds. Hegarmanah, Kec. Cicantayan	Manggis
10	Poktan Megafruit (Mustika Lestari XI)	Ds. Hegarmanah, Kec. Cicantayan	Manggis
11	Poktan Padangerti	Desa Bojong kembar, Kecamatan Cikembar	Manggis
12	POKTAN KEMUNING (Vivi Erita)	Ds. Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak	Temulawak
13	M. Oping	Ds. Mekarjaya, Kecamatan Ciemas	Temulawak
14	Chevi Permadi	Ds. Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak	Pepaya
15	Ujang Nuryaman	Ds. Cipetir Kecamatan Kadudampit	Cabe Merah
16	Abdurachman	Ds. Pangumbahan, Kecamatan Ciracap	Bawang Merah
17	Bulhin Supriyadi	Ds. Cipamingkis, Kecamatan Cidolog	Temulawak

## 7. Penanganan rawan pangan

Penanganan rawan pangan dilaksanakan melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah untuk itu perlu dilakukan pemetaan SKPG dan FSVA yang merupakan bahan untuk mengambil kebijakan penanganan rawan pangan secara dini analisa hingga akhir tahun 2015 baru terlaksana 1 pemetaan ditingkat Kabupaten Sukabumi melalui penyusunan Food Security Vulnerbility Atlas (FSVA) yang terbagi dalam 6 prioritas desa rentan pangan, berikut data berdasarkan prioritas :

Tabel : Prioritas 1 di tingkat desa rentan pangan berdasarkan pemetaan 2015.

<b>N0</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>N0</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
1	CIEMAS	GIRIMUKTI	27	PURABAYA	PAGELARAN
2	KALI BUNDER	SEKARSARI	28	NYALINDUNG	SUKAMAJU
3	KALI BUNDER	SUKALUYU	29	CARINGIN	SEUSEUPAN
4	TEGAL BULEUD	RAMBAY	30	CIAMBAR	GINANJAR
5	TEGAL BULEUD	NANGELA	31	CIAMBAR	WANGUNJAYA
6	TEGAL BULEUD	BANGBAYANG	32	CIDAHU	GIRIJAYA
7	CIDOLOG	CIKARANG	33	BOJONG GENTENG	BOJONG GALING
8	CIDOLOG	CIPAMINGKIS	34	BOJONG GENTENG	CIPANENGAH
9	CIDOLOG	TEGALLEGA	35	KALAPA NUNGGAL	WALANGSARI
10	SAGARANTEN	PUNCAKMANGGIS	36	CIKIDANG	MEKARNANGKA
11	CIDADAP	TENJOLAUT	37	CIKIDANG	GUNUNG MALANG
12	CURUGKEMBAR	MEKARTANJUNG	38	CIKIDANG	NANGKAKONENG
13	CURUGKEMBAR	BOJONG TUGU	39	CIKIDANG	TAMANSARI
14	LENGKONG	TEGALLEGA	40	CIKIDANG	CIKARAE THOYIBAH
15	SIMPENAN	MEKARASIH	41	CISOLOK	PASIRBARU
16	WARUNG KIARA	HEGARMANAH	42	CISOLOK	SIRNARESMI
17	WARUNG KIARA	BANTARKALONG	43	CISOLOK	CICADAS
18	WARUNG KIARA	GIRIJAYA	44	CISOLOK	CIKELAT
19	BANTARGADUNG	BANTARGEBAH	45	CISOLOK	GUNUNG KRAMAT
20	BANTARGADUNG	MANGUNJAYA	46	CISOLOK	GUNUNG TANJUNG
21	BANTARGADUNG	LIMUSNUNGGAL	47	CISOLOK	WANAJAYA
22	BANTARGADUNG	BOYONGSARI	48	CIKAKAK	SUKAMAJU
23	JAMPANG TENGAH	BANTARPANJANG	49	CIKAKAK	MARGALAKSANA
24	JAMPANG TENGAH	BOJONGTIPAR	50	CIKAKAK	SIRNARASA
25	JAMPANG TENGAH	BOJONG JENGKOL	51	KABANDUNGAN	MEKARJAYA
26	JAMPANG TENGAH	TANJUNGSARI	52	KABANDUNGAN	CIANAGA

Tabel : Desa Rentan Pangan Prioritas. 2.

No	Kecamatan	Desa	No	Kecamatan	Desa
1	CIEMAS	MEKARSAKTI	19	NYALINDUNG	CIJANGKAR
2	CIMANGGU	SUKAJADI	20	GEGER BITUNG	CIENGANG
3	KALI BUNDER	MEKARWANGI	21	CIREUNGHAS	CIKURUTUG
4	SAGARANTEN	SINAR BENTANG	22	CIREUNGHAS	TEGALPANJANG
5	SAGARANTEN	DATARNANGKA	23	CICANTAYAN	SUKADAMAI
6	SAGARANTEN	CIBITUNG	24	CICANTAYAN	CIMANGGIS
7	SAGARANTEN	CIBAREGBEG	25	CARINGIN	MEKARJAYA
8	PABUARAN	PABUARAN	26	CARINGIN	PASIRDATAR INDAH
9	PABUARAN	SIRNASARI	27	NAGRAK	DARMAREJA
10	PABUARAN	LEMBURSAWAH	28	PARAKAN SALAK	SUKATANI
11	SIMPENAN	CIHAUR	29	PARAKAN SALAK	BOJONGASIH
12	SIMPENAN	CIBUNTU	30	KALAPA NUNGGAL	KADUNUNGGAL
13	WARUNG KIARA	DARMARAJA	31	CIKIDANG	SAMPORA
14	WARUNG KIARA	KERTAMUKTI	32	CIKIDANG	BUMISARI
15	BANTARGADUNG	BUANAJAYA	33	CISOLOK	SUKARAME
16	PURABAYA	CITAMIANG	34	KABANDUNGAN	TUGUBANDUNG
17	CIKEMBAR	SUKAMULYA	35	KABANDUNGAN	CIPEUTEUY
18	NYALINDUNG	BOJONGKALONG			

Data di dapat berdasarkan Hasil Penyusunan FSVA tingkat Desa dari validasi data Kecamatan yang sewaktu-waktu dapat berubah.

## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

### 2.5.1. Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya teknologi yang selalu berkembang,
- b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan,
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik; makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas,

- d. Potensi diversifikasi bahan pangan.
1. Adanya penyuluh swadaya sebanyak 112 orang ;
  2. Adanya penyuluh tenaga harian lepas dari Departemen Pertanian ;
  3. 62% penduduk Kabupaten Sukabumi berprofesi sebagai petani ;
  4. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan cukup tinggi ;
  5. Jumlah kelompok tani sebanyak 3806 kelompok ;
  6. Agroklimat sangat mendukung untuk pengembangan usaha pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan ;
  7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan usaha tani ;
  8. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, industri dan infrastruktur jalan lingkar selatan dan jalan tol.

### **2.5.2. Tantangan (*Threat*)**

- a. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi;
  - b. Berlangsungnya perubahan iklim;
  - c. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha;
  - d. Fluktuasi harga pangan;
  - e. Menurunnya kinerja penyuluh sebagai dampak dari kualitas dan kuantitas penyuluh;
  - f. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas lahan produktif;
  - g. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam dan bergizi;
- 
1. Peningkatan pola pikir dan perilaku dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern berwawasan agribisnis ;
  2. Upaya menjadikan sektor pertanian sebagai usaha yang menarik bagi generasi muda ;
  3. Menjadikan kelembagaan petani sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan yang solid dan kuat ;

4. Mendorong percepatan terbitnya PERBUP tentang SOP bansos/Hibah bagi kelembagaan tani yang selanjutnya dijadikan Perda ;
5. Mengupayakan penempatan satu penyuluh satu desa melalui penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta ;
6. Penetapan spesialisasi kompetensi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan mengacu pada sistem agribisnis ;
7. Mendorong peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan P4S ;
8. Mendorong keswadayaan pelaku utama dan intervensi pemerintah untuk menumbuhkan Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat desa (Posluhdes) ;
9. Meningkatkan jumlah pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis bagi aparatur dan non aparatur ;
10. Perencanaan kegiatan tahunan dan revisi anggaran lingkup BP4K belum sepenuhnya berjalan baik ;
11. Penataan aset-aset BP4K belum terselesaikan dengan baik ;
12. Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal.

## **2.6. Gambaran Pelayanan BP4K**

### **A. Aspek Kelembagaan**

#### **a. Kelembagaan penyuluhan :**

Kelembagaan Penyuluhan Tingkat kabupaten saat ini berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 01 Januari 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 Tanggal 08 Pebruari 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sukabumi telah disahkan BP4K. Tingkat kecamatan terdapat 47 unit BP3K, dengan jumlah Posluhdes di tingkat desa sebanyak 121 unit dan Kelembagaan petani sebanyak 3.806 kelompok tani dan 350 gapoktan.

Tabel 2.6. Matrik Keragaan Kelembagaan Tani

No	Kelas Kelompok	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pemula	-	-	1957	1836	1673
2.	Lanjut	-	-	1384	1445	1574
3.	Madya	-	-	253	325	533
4.	Utama	-	-	459	25	26
<b>Jumlah</b>		-	<b>3629</b>	<b>3643</b>	<b>3631</b>	<b>3806</b>

### b. Kelembagaan Pelatihan

Kelembagaan pelatihan di daerah terdiri dari ; pelatihan yang langsung dikelola oleh BP4K Pelatihan di masyarakat dengan nama P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya). Jumlah P4S di kabupaten Sukabumi sebanyak 14 unit.

### B. Aspek Ketenagaan

Jumlah aparatur di lingkungan BP4K di tingkat kabupaten dan kecamatan sebanyak 70 orang, dengan latar belakang pendidikan terdiri dari : SLTA ke bawah yaitu sebanyak 42,9 %, DIII sebanyak 10,1 %, DIV/S1 sebanyak 41,7 %, dan S2 sebanyak 5,2 %.

- Penyuluh PNS Pertanian : 86 orang
- Penyuluh PNS Perikanan : 12 orang
- THL □ TB PP : 113 orang
- THL □ TB PPD : 59 orang

Penghargaan dan prestasi yang diperoleh, baik oleh petani hasil binaan para penyuluh, penyuluh maupun kelembagaan penyuluhan antara lain :

- Juara I Tingkat Nasional Petani Berprestasi an. Bapak Sahlan Kecamatan Surade Tahun 2012
- Juara II Tingkat Provinsi dan FMA Unggulan Nasional oleh Gapoktan/FMA Rimba Makmur Kecamatan Cibitung Tahun 2012
- Juara II Tingkat Nasional KTH Berprestasi an. Kelompok Tani Karya Tani Tahun 2012
- Juara III Penyuluh Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Barat an. Budi Komara Tahun 2012

- Juara I Tingkat Jawa Barat Desa Peduli Kehutanan an. Desa Nyalindung Tahun 2012
- Juara I Tingkat Nasional Desa Peduli Kehutanan an. Desa Nyalindung Tahun 2012
- Juara I PKSM Tingkat Nasional an. Bapak Aden S Tahun 2014
- Juara II Adi Bakti Tani Tingkat Nasional an. BP3K Sukalarang Tahun 2013
- Juara II BP3K Berprestasi Tingkat Nasional an. BP3K Sukalarang Tahun 2013
- Juara III Penyuluh Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat an. Ade Zaenal Abidin Tahun 2013
- Juara I Tingkat Jawa Barat Lomba Teknologi Tepat Guna Kehutanan an. Iman R Tahun 2013
- Juara II Tingkat Jawa Barat Lomba Karya Tulis Ilmiah Penyuluhan Kehutanan an. Asri Muliawati dari BP3K Cicurug Tahun 2015
- Juara III Karya Tulis Ilmiah Penyuluhan Perikanan an. Herlan dari BP3K Sukabumi 2015
- Juara III PKSM Tingkat Provinsi an. Baban (alm) dari Kecamatan Cibadak Tahun 2011
- Juara II Tingkat Jawa Barat Kontes Pohon Bidang Kehutanan an. Ade dari Kecamatan Gunung Guruh Tahun 2010
- Juara II Kontes Pohon Bidang Kehutanan an. Enjang Margana dari Kecamatan Nagrak Tahun 2011
- Juara I Tingkat Nasional Karya Tulis Ilmiah Penyuluh Pertanian a. Diat Sujatman Tahun 2011
- Mendali Platinum (Tertinggi) Kemitraan Bidang Kehutanan an. Kelompok Tani Rukun Tani Kecamatan Waluran Tahun 2014
- Juara II Nasional Lomba Ikan Hias an. Mizumi Koi Kecamatan Caringin Tahun 2014
- Juara II Nasional P2MKP an. DJ. Fish Kecamatan Cisaat Tahun 2014
- Juara II Nasional Pengolahan Hasil Perikanan an. Kecamatan Saluyu Kecamatan Sukaraja Tahun 2013



- Juara III Tingkat Nasional Poklaksar Perikanan an. Kelompok Flamboyan Kecamatan Sukaraja Tahun 2014
- Juara Harapan I Tingkat Nasional Karya Tulis Ilmiah Pertanian Tahun 2014
- Juara I kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2015 an. Iman Rusmandar S.Hut
- Juara II Tingkat Jawa Barat Lomba Karya Tulis Ilmiah Penyuluhan Kehutanan an. Asri Muliawati dari BP3K Cicurug Tahun 2015
- Juara III Tingkat Jawa Barat Karya Tulis Ilmiah Penyuluhan Perikanan an. Herlan dari BP3K Sukabumi Tahun 2015
- Juara II Tingkat Nasional Karya Tulis Ilmiah Penyuluhan Pertanian an. Susi Susilowati ,SP dari BP3K Sukabumi Tahun 2016
- Juara Harapan I Tingkat Nasional Karya Tulis Ilmiah Penyuluh Pertanian an. Iwan Setiawan, SP dari BP3K Sukalarang Tahun 2016

### **C. Aspek Penyelenggaraan**

Hasil yang telah dicapai selama 5 tahun dari sisi penyelenggaraan penyuluhan adalah sebagai berikut :

- Program Penyuluhan Pertanian Partisipatif;
- Penyebaran Materi penyuluhan pertanian dalam berbagai media (Televisi, radio, tabloid pertanian, Lembar Informasi Pertanian/LIPTAN, brosur/leaflet, Mimbar penyuluhan agribisnis, penggandaan VCD);
- Penyediaan 329 Buku Kerja dan laporan Monev bagi Penyuluh dan THL □ TBPP
- Pengembangan 3 BPP Model di 3 Kecamatan;
- Fasilitasi BOP bagi 195 Penyuluh PNS;
- Penyebaran Penyediaan Tabloid Sinar Tani bagi penyuluh sebanyak 207 eksemplar;
- Ikut serta Penyelenggaraan PENAS XII di Banyuasin, Sumsel;
- Ikut serta pada Jambore Penyuluh Pertanian di Guci, Tegal dan Cibodas;
- Ikut serta dalam jambore penyuluh di Cianjur yang dibuka oleh Presiden RI.

#### **D. Aspek Kerjasama Penyuluhan dan Informasi Teknologi**

Dalam mentransformasi informasi teknologi pada kegiatan penyuluhan BP4K bekerjasama dengan 5 lembaga perguruan tinggi diantaranya adalah (IPB, UNPAD, ITB Fakultas Agrotek, Unwim, Universitas Djuanda dan UMMI), adapun capaian kinerja dalam kegiatan kerjasama penyuluhan dan informasi teknologi adalah sebagai berikut :

1. Informasi dan teknologi yang sudah akses sebanyak 38 teknologi, teknologi yang telah didesiminasikan sebanyak 48 teknologi,
2. Kerjasama dengan litbang 1 MoU (BPTP Jabar),
3. Kerjasama dengan perusahaan saprodi - MoU,
4. Pengembangan website BP4K 1 paket,
5. Pengembangan SIMluh 1 paket.

#### **E. Pengembangan Administrasi Dan Manajemen**

##### **a. Perencanaan**

Capaian kinerja dari sisi perencanaan dan program selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Strategis BP4K Tahun 2016-2021
- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

##### **b. Keuangan dan Perlengkapan**

Capaian kinerja dari sisi keuangan dan perlengkapan :

- Tersusunnya Laporan keuangan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) ;
- Tersusunnya rekonsiliasi anggaran lingkup pertanian ;
- Penataan asset tidak bergerak (tanah dan bangunan) BP4K dan BP3K;
- Penataan dan sertifikasi asset yang bermasalah di BP4K dan BP3K;
- Tersusunnya Laporan Asset melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- Tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Akuntansi & Keuangan (SIMAK) dan Sistem Informasi Manajemen Barang Persediaan.

### **c. Organisasi dan Kepegawaian**

Capaian Kinerja dari aspek organisasi dan kepegawaian, adalah sebagai berikut :

- Tersusunnya Prosedur Tetap Pengelolaan 3M (*Man, Money and Material*);
- Tersusunnya formasi, *bezzetting* dan kebutuhan pegawai;
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh Pejabat Eselon III, IV dan pejabat fungsional lingkup BP4K
- Kenaikan pangkat
- Gaji Berkala
- Pensiun

### **d. Evaluasi dan Pelaporan**

Capaian kinerja pada aspek evaluasi dan pelaporan yang telah diselesaikan pada saat RPJMD tahap 2, diantaranya :

- Penyempurnaan sistem monev dan pelaporan lingkup BP4K dari mulai laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan asset;
- Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan Badan BP4K.

**Tabel Capaian Kinerja BP4K Kabupaten Sukabumi 2010 -2015**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi BP4K	Target SPN	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian tahun ke - (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyusunan dokumen Renstra BP4K			Dok	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja BP4K			Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Penyusunan Dokumen Programa Penyuluhan Tingkat Kabupaten			Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4	Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan			Dok	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	100	100	100	100	100
5	Diseminasi Teknologi melalui siaran pedesaan			Kali	52	52	52	52	52	52	52	60	70	75	100	100	100	115	107

6	Jumlah Teknologi pertanian Tanaman Pangan dan Palawija yang didiseminasikan			Teknologi	20	20	20	23	25	25	25	27	25	33	100	115	100	108	132
7	Jumlah teknologi hortikultura yang didiseminasikan			Teknologi	20	20	25	25	25	27	30	30	35	42	100	100	115	100	120
8	Jumlah Teknologi Peternakan yang didiseminasikan			Teknologi	30	30	30	30	30	35	35	35	35	40	100	100	116	100	114
9	Jumlah Teknologi Pengolahan hasil yang didiseminasikan			Teknologi	15	15	15	15	15	20	15	15	16	22	100	100	130	100	137
10	Jumlah Teknologi Perkebunan yang didiseminasikan			Teknologi	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	100	100	100	100	125
11	Jumlah Teknologi Perikanan yang didiseminasikan			Teknologi	10	10	10	12	10	12	10	10	10	12	100	120	120	100	120
12	Jumlah Teknologi kehutanan yang didiseminasikan			Teknologi	-	-	-	-	12	12	15	15	15	15	-	-	100	100	100



**Tabel Keberhasilan pelaksanaan program selama 5 tahun berdasarkan program ditunjukkan dengan capaian seperti pada tabel berikut :**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Terciptanya usaha-usaha ekonomi masyarakat pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan) yang berorientasi pada skala usaha ekonomi , serta terciptanya iklim yang kondusif antara subsistem agribisnis yang meliputi hulu (penyediaan saprodi), proses produksi (budidaya) dan hilir (pengolahan dan pemasaran)	Terwujudnya usaha ekonomi pedesaan	Kelompok	221	251	289	337	367
	Berkembangnya unit-unit komoditas unggulan	Kelompok	648	414	456	493	531
		MoU	17	195	199	201	203
	Terciptanya peluang lapangan kerja di sektor pertanian	Orang	107.500	125.500	127.320	128.765	128.850

**Tabel 2.9. Capaian Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan (karbohidrat, lemak dan protein) secara berkelanjutan	Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan melalui Diseminasi Teknologi PTT dan Pembinaan Kelembagaan Tani berbasis Padi Sawah	Kecamatan			47	47	47

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan melalui-Pembinaan Kelembagaan Tani berbasis usahatani tembakau	Kelompok			5		
	Diseminasi Teknologi Usaha Tani Berbasis Usaha Agribisnis Terpadu	Kecamatan				16	20

**Tabel Capaian Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Pertanian**

## **F. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP4K Kabupaten Sukabumi**

### **a. Tantangan**

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai indikator untuk mewujudkan visi dan misi SKPD terdapat beberapa tantangan yang menjadi bahan kajian yang harus ditindak lanjuti diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pola pikir dan perilaku dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern berwawasan agribisnis ;
2. Upaya menjadikan sektor pertanian sebagai usaha yang menarik bagi generasi muda ;
3. Menjadikan kelembagaan petani sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan yang solid dan kuat ;
4. Mendorong percepatan terbitnya PERBUP tentang SOP bansos/Hibah bagi kelembagaan tani yang selanjutnya dijadikan Perda ;
5. Mengupayakan penempatan satu penyuluh satu desa melalui penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta ;
6. Penetapan spesialisasi kompetensi penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan mengacu pada sistem agribisnis ;
7. Mendorong peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk menumbuh kembangkan P4S ;



8. Mendorong keswadayaan pelaku utama dan intervensi pemerintah untuk menumbuhkan Pos Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat desa (Posluhdes) ;
9. Meningkatkan jumlah pelatihan di bidang manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan dan teknis agribisnis bagi aparatur dan non aparatur ;
10. Perencanaan kegiatan tahunan dan revisi anggaran lingkup BP4K belum sepenuhnya berjalan baik ;
11. Penataan aset□aset BP4K belum terselesaikan dengan baik ;
12. Monitoring dan evaluasi belum berjalan secara optimal.

#### **b. Peluang**

Dari potensi yang ada, untuk mewujudkan terselenggaranya system penyuluhan yang professional, maju dan tangguh terdapat beberapa peluang sebagai berikut :

1. Adanya penyuluh swadaya sebanyak 112 orang ;
2. Adanya penyuluh tenaga harian lepas dari Departemen Pertanian ;
3. 62 % penduduk Kabupaten Sukabumi berprofesi sebagai petani ;
4. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan cukup tinggi ;
5. Jumlah kelompok tani sebanyak 3806 kelompok ;
6. Agroklimat sangat mendukung untuk pengembangan usaha pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan ;
7. Belum optimalnya pemanfaatan lahan usahatani ;
8. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, industri dan infrastruktur jalan lingkar selatan dan jalan tol.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Analisis isu-isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai pijakan penting dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi pada hakikatnya menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dengan cita-cita pembangunan. Sedangkan isu strategis sendiri merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Dalam RPJPD Tahap III atau RPJMD Ke-3 (2016-2021) ditujukan untuk menumbuhkembangkan produktivitas setiap wilayah sebagai pusat-pusat produksi yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat pada setiap wilayah di Kabupaten Sukabumi dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Sukabumi terhadap pembangunan Jawa Barat dan pembangunan Nasional.

Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kabupaten Sukabumi dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya di Tahap Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, khususnya bidang pangan dengan mengisi tabel sebagai berikut :



**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah**

No	Sasaran Pokok RPJPD	Indikator dan Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	Bidang Pertanian dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perekonomian lokal diarahkan untuk menciptakan agro-industri</li> <li>• SDM berkualitas, diarahkan untuk mewujudkan standar kompetensi aparatur (tenaga penyuluh) serta kelompok/gapoktan</li> <li>• Infrastruktur pertanian, diarahkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana kelembagaan pasar komoditas pertanian di tingkat petani (<i>Farm-Gate Market</i>) maupun nelayan</li> <li>• Ketahanan Pangan dan Energi, diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi sebagai dampak dari ketahanan pangan (<i>food security</i>) dan kedaulatan pangan (<i>food sovereignty</i>); Meningkatkan aksesibilitas petani dan nelayan terhadap sumber daya produktif, termasuk permodalan dan infrastruktur pertanian</li> <li>• Regulasi PEL, diarahkan untuk Mewujudkan komitmen bersama dalam mengembangkan agribisnis untuk seluruh stakeholder; Mewujudkan peraturan daerah tentang lahan abadi pertanian;</li> <li>• Indikator Makro Agribisnis, yang ditujukan untuk mewujudkan kendali peningkatan indikator makro pembangunan agribisnis 20 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pembangunan ekonomi lokal belum berbasis agro industri</li> <li>• SDM Aparatur (tenaga penyuluh) belum memenuhi standar kompetensi</li> <li>• Belum optimalnya kualitas kompetensi Kelompok Tani/Gapoktan</li> <li>• Belum adanya pasar komoditas untuk petani dan nelayan</li> <li>• Masih banyak terdapat daerah rawan pangan</li> <li>• Belum sepenuhnya pelaksanaan Perda LP2B</li> <li>• Belum terwujudnya indikator makro agribisnis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan ekonomi lokal berbasis lokal</li> <li>• Bimtek dan Diklat bagi Aparatur (tenaga penyuluh)</li> <li>• Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan</li> <li>• Pendirian sentra komoditas</li> <li>• Penanganan desa rentan pangan dan penyediaan bahan pangan masyarakat</li> <li>• Penegakan Perda LP2B</li> <li>• Nilai Tukar Petani (NTP) dan Kontribusi pertanian terhadap PDRB</li> </ul>

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan sebagai “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah dengan kondisi riil saat dokumen perencanaan ini sedang dirumuskan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi sehingga terjadi kesenjangan tersebut. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi serta bagaimana visi dan misi Kabupaten Sukabumi dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi hingga akhir periode pelaksanaan pembangunan nanti.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Kabupaten Sukabumi di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya bersama dengan pengembangan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki. Penekanan pada sub bab ini, yaitu permasalahan pembangunan daerah adalah rumusan yang memiliki dampak tertinggi bagi masyarakat dan daerah. Hambatan maupun tantangan yang akan diselesaikan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan sumber daya dan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi.

Rendahnya penguasaan lahan oleh masyarakat berdampak pada rendahnya ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 87 desa sebagai desa rentan pangan yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. Sedangkan kesejahteraan petani diukur oleh pendapatan bersih para petani setiap musim kemudian *breakdown* menjadi pendapatan bulanan. Pendapatan para petani berdasarkan hasil kajian masih dibawah UMR. Kondisi ini berakibat pada penurunan jumlah petani. Jumlah petani di Kabupaten Sukabumi tahun 2003 berdasarkan hasil sensus BPS 354.800 KK sedangkan tahun 2013 sebanyak 291.754 KK tani atau turun 63.046 atau 17,77%.

## 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

### 3.2.1. Visi

Memasuki periode pembangunan jangka menengah kepala daerah yang baru, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah memiliki visi pembangunan yang merepresentasikan keinginan kepala daerah terpilih selama masa kepemimpinannya. Visi pembangunan merupakan hal penting dan utama untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perkembangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Sukabumi. Selain itu, visi juga dibangun sebagai usaha bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan tentang apa yang ingin dicapai dalam satu periode pembangunan (dalam hal ini pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021).

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut :

**“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”**

### 3.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (*the choosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Suatu rumusan Misi pembangunan daerah menjadi alasan utama suatu organisasi (pemerintah daerah) harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan.

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh DKP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi ke satu RPJMD adalah sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
1	2	3	4
<b>1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian</b>			
Terciptanya Kesempatan kerja di sektor agribisnis	Meningkatkan kesempatan kerja di sektor pertanian melalui pengolahan produksi pemasaran hasil pertanian, dan pengembangan usaha agribisnis melalui kelompok tani.	Penumbuhan wirausahawan baru di sektor pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Penumbuhan kelompok tani baru	
Meningkatnya Produksi Pangan	Meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan	Intensifikasi pertanian, perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Optimalisasi lahan pertanian	
		Pembangunan infrastruktur pertanian	
		Pengembangan sarana dan alat mesin pertanian	
Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan Serta Teratasinya kerawanan pangan	Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan	Penanganan Desa Rentan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Penyediaan bahan pangan serta cadangan pangan masyarakat dan pemerintah	
		Pengembangan penganekaragaman pangan	
		Pengawasan distribusi dan akses pangan	
Terwujudnya Sentra	Mengembangkan Sentra	Deliniasi sentra agribisnis dan	Program Peningkatan



Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
1	2	3	4
Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Agribisnis berbasis Kawasan	penetapan sentra berbasis kawasan	Kesejahteraan Petani
		Diversifikasi olahan dan pemasaran hasil pertanian	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani berorientasi agribisnis berbasis potensi lokal	Menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan petani sebagai kekuatan ekonomi petani	Optimalisasi peran kelembagaan petani sebagai lembaga keuangan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Penumbuhan dan pengembangan ekonomi petani melalui kelembagaan petani	
Meningkatnya Produksi Pertanian Non Pangan	Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian non pangan	Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi komoditi pertanian non pangan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
		Meningkatkan adopsi teknologi pertanian	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi.**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian**

##### **1. Visi Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan**

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperhatikan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara sinergis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yaitu pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015 – 2019, yaitu :

**“Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”**

##### **2. Misi Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan**

Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

### **3.3.2. Telaahan Renstra provinsi**

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi dan Misi Jawa Barat yaitu “Maju dan Sejahtera untuk Semua”, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat, maka Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2013 – 2018 adalah :

**“Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan“**

Arti dari visi tersebut adalah bahwa Badan Ketahanan Pangan berkeinginan menjadi institusi yang memiliki kekuatan, kemampuan dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup baik kualitas maupun kuantitas secara terus menerus setiap waktu diseluruh pelosok wilayah Jawa Barat.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan 4 Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- 1) Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor ;
- 2) Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat, Berbasis Potensi Lokal ;
- 3) Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat ;
- 4) Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terdapat beberapa faktor-faktor penghambat dan

pendorong dari pelayanan Badan Ketahanan Pangan yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut :

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan badan Ketahanan Pangan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BKP	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Penanganan Desa Rentan Pangan	Masih tingginya tingkat kerawanan pangan di Kab. Sukabumi	Tidak semua Kecamatan memiliki data Desa rawan Pangan	Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN/APBD Prov/APBD Kab.

Tabel 3.4 Hasil Kajian Lingkungan Hidup Terkait Tugas dan Fungsi OPD

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi Rawan Pangan	Belum semua Desa memiliki lumbung pangan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya Rawan Pangan	Belum terdatanya lumbung pangan yang dibangun oleh masyarakat	Dukungan Anggaran yang bersumber dari APBN/APBD Prov/APBD Kab.
2.	Banyaknya "Rawan Bencana Alam"	Lambannya antisipasi dalam penyaluran bantuan pangan terhadap korban bencana alam	Terbenturnya birokrasi dalam penyaluran cadangan pangan	Tersedianya cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup

### 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis pada Dinas Ketahanan Pangan adalah Sebagai berikut :

## **a. Ketersediaan Pangan**

Laju peningkatan kebutuhan pangan, untuk beberapa komoditas, lebih cepat dari laju peningkatan produksi. Di samping produktivitas tanaman di tingkat petani pada berbagai komoditas pangan relatif stagnan, juga disebabkan terbatasnya kapasitas produksi. Stagnasi produktivitas antara lain disebabkan oleh lambatnya penemuan dan pemasyarakatan teknologi inovasi, serta rendahnya insentif finansial untuk menerapkan teknologi secara mal. Melemahnya sistem penyuluhan pertanian juga merupakan kendala lambatnya adopsi teknologi oleh petani. Masih banyaknya petani gurem (luas garapan < 0,5 ha) yang mempunyai aksesibilitas terbatas pada sumber permodalan, teknologi, dan sarana produksi, sehingga sulit meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa difasilitasi pemerintah. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, serta peningkatan kualitas penyuluhan merupakan tantangan pembangunan ketahanan pangan ke depan.

Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan di Kabupaten Sukabumi antara lain disebabkan : (i) Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (ii) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (iii) semakin terbatas dan tidak pastinya penyediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; (iv) rusaknya sekitar 30 persen prasarana pengairan; (v) persaingan pemanfaatan sumber daya air dengan sektor industri dan pemukiman; (vi) tidak adanya jaminan pasokan dan harga gas untuk memproduksi pupuk yang cukup; (vii) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi; (viii) terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan; (ix) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi; (x) rendahnya kemampuan mengelola cadangan pangan; (xi) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak; (xii) anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan.

## **b. Distribusi Pangan**

Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu, dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar dan antar musim merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh wilayah konsumen

sepanjang waktu. Pada banyak kepedulian dan kemampuan mengelola kelancaran distribusi masih terbatas, sehingga sering terjadi ketidakstabilan pasokan dan harga pangan, yang berdampak pada gangguan ketahanan pangan di bersangkutan. Masalah dan tantangan dalam subsistem distribusi pangan mencakup terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama terpencil, keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar, banyak pungutan resmi dan tidak resmi, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan. Masih terdapatnya daerah-terpencil terutama di Kabupaten Sukabumi bagian selatan, menyebabkan pasokan pangan sering mengalami hambatan. Tantangan yang harus diantisipasi adalah, mengembangkan prasarana dan sarana distribusi pangan dan hasil pertanian ke seluruh wilayah agar tidak terjadi kelangkaan pasokan.

Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di daerah-terpencil. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan harga secara signifikan di sentra produksi pada saat panen, sebaliknya meningkatkan harga secara tajam pada musim paceklik. Di samping itu, masih terdapat kelembagaan pemasaran yang dikuasai kelompok-kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan sistem yang adil di antara para pelakunya.

Sistem pemerintahan otonomi telah mendorong setiap pemerintahan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang berdampak pada meningkatnya pos-pos pungutan atau retribusi di sepanjang jalur distribusi dan pemasaran, oleh berbagai tingkat pemerintahan, baik resmi maupun tidak resmi. Berbagai pungutan tersebut telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan.

Masalah keamanan jalur distribusi pada saat ini masih menjadi hambatan yang cukup memprihatinkan. Berbagai tindak kriminal, seperti pencurian dan perampokan masih terus berlangsung di jalur distribusi darat maupun laut, sehingga para pelaku usaha harus menambah biaya untuk tambahan tenaga pengamanan, atau seringkali mengalami kerugian karena kehilangan barang. Beban ini tentunya akan diteruskan kepada konsumen, sehingga biaya yang harus dibayar semakin bertambah. Penurunan pungutan dan perlindungan sistem distribusi dari tindak kriminal merupakan tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Kebijakan yang terkait dengan distribusi pangan dimaksudkan untuk memperlancar pasokan dan memfasilitasi keterjangkauan masyarakat, sekaligus memproteksi sistem ekonomi dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dari persaingan yang kurang menguntungkan khususnya tekanan perdagangan global. Dalam merumuskan kebijakan tersebut, pemerintah perlu mengembangkan strategi dengan justifikasi yang tepat, sehingga tidak bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati. Beberapa kiat kebijakan yang telah diterapkan oleh beberapa daerah antara lain: konsep *strategic product* (SP) untuk beras, jagung, kedelai, gula. Sebagai justifikasi untuk menerapkan instrumen khusus antara lain : (a) penyesuaian tarif bea masuk; (b) penerapan hambatan *non tariff* (tataniaga, karantina, termasuk pelarangan impor beras pada periode tertentu; (c) pemberian subsidi pupuk; (d) penetapan harga pembelian pemerintah/HPP. Kebijakan tersebut akan mendapat tantangan dari negara lain yang merasa dirugikan kepentingannya, sehingga perlu secara terus menerus dilakukan pengkajian dan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan perdagangan yang berlaku.

### **c. Konsumsi Pangan**

Konsumsi pangan dengan gizi cukup dan seimbang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan intelegensia manusia. Volume dan kualitas konsumsi pangan dan gizi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pengetahuan dan budaya masyarakat.

Walaupun secara umum kualitas konsumsi masyarakat pada 2014 cenderung membaik, tetapi konsumsi pangan sumber energi masih di dominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras, sementara tingkat konsumsi kelompok pangan hewani dan kelompok pangan sumber vitamin dan mineral pada tahun 2005 masih di bawah AKG yang dianjurkan. Mutu dan keragaman pangan penduduk perkotaan masih lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Demikian pula dengan konsumsi protein, penduduk perkotaan mengkonsumsi protein lebih tinggi dari pada perdesaan.

Sampai saat ini konsumsi beras perkapita masih sangat tinggi, yaitu sekitar 112 kg/kap/tahun. Dengan jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah, serta persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan yang semakin ketat, maka dominasi beras

dalam pola konsumsi pangan ini cukup memberatkan upaya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan bertumpu pada sumber daya lokal.

Permasalahan dan tantangan yang perlu diantisipasi dan diatasi dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang adalah: (i) besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah; (ii) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi; (iii) masih dominannya konsumsi sumber energi karbohidrat yang berasal dari beras; (iv) rendahnya kesadaran dan penerapan sistem sanitasi dan higienis rumah tangga; dan (v) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

#### **d. Kerawanan Pangan**

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup, (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga, (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan, karena Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini, maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan/kerawanan pangan dan status gizi yang rendah.

Isu-isu sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat diidentifikasi sebagaimana terlihat pada dibawah ini :



Tabel 3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Isu-isu Strategis Ketahanan Pangan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Ketersediaan	Laju peningkatan kebutuhan pangan, lebih cepat dari laju peningkatan produksi.	Neraca Bahan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya fasilitas permodalan di pedesaan</li> <li>- Rendahnya kemampuan mengelola cadangan pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laju Pertumbuhan Penduduk</li> <li>- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian</li> <li>- Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</li> <li>- Lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;</li> <li>- Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan</li> </ul>	Meningkatnya ketergantungan pada produk pangan dari luar daerah/Import
Distribusi Harga Pangan	Distibusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidak stabilan harga pangan	Data Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem pasar pangan yang belum efektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama terpencil</li> <li>- Keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar (fisik)</li> <li>- Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan</li> </ul>	Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Konsumsi dan Keamanan Pangan	Konsumsi pangan pokok didominasi oleh kelompok padi-padian terutama beras (112 perkapita/tahun)  Masih ditemukannya ketidakamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat	PPH Konsumsi	Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi.  Belum optimalnya pengawasan pangan yang beredar di pasar	kondisi ekonomi, budaya masyarakat  Rendahnya kepedulian produsen terhadap keamanan pangan  Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi	Promosi dan informasi pangan belum optimal  Kurangnya Sosialisasi tentang keamanan Pangan Segar.
Kerawanan Pangan	Tingginya Prosentase Rentan Pangan, sebanyak 23,01% Kecamatan masuk dalam prioritas 1 sangat rentan sampai prioritas 2 cukup rentan.	FSVA & SKPG		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase penduduk miskin (10,33%)</li> <li>- Rendahnya daya beli masyarakat (Rp. 628.710)</li> <li>- Banyaknya yang masuk kategori Rawan bencana alam</li> </ul>	Kurangnya pemahaman Peta Kerawanan pangan sampai tingkat desa.
Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Belum Optimalnya kapasitas penyuluh, terutama Tenaga Harian Lepas (THL)	Program Penyuluhan	Terbatasnya anggaran Bimbingan Teknis / Diklat	Terbatasnya jumlah diklat di Balai Pelatihan Propinsi dan Pusat	Tidak semua teknologi dapat didesiminasikan secara optimal
	Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian	Nominatif Pegawai	Recruitment tenaga fungsional penyuluh pertanian	Keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap ketenagaan penyuluh masih lemah	Kurang maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat tani/petani

Kelembagaan Tani	- Kemandirian Poktan/Gapoktan masih lemah	- Program Penyuluh	- Terbatasnya tenaga penyuluh - Terbatasnya anggaran pemberdayaan kelembagaan tani	- Lemahnya aspek manajerial pengurus Poktan/Gapoktan - Masih rendahnya motivasi organisasi anggota Poktan/Gapoktan - Masih lemahnya keterikatan organisasi diantara anggota Poktan/Gapoktan	
	- Dinamika Poktan/Gapoktan masih lemah	- Program Penyuluhan	- Terbatasnya tenaga penyuluh  - Terbatasnya anggaran penyuluhan	- Masih lemahnya pemahaman pengurus dan anggota terhadap organisasi Poktan/Gapoktan  - Lemahnya Pengadministrasian Poktan/Gapoktan	- Belum Optimalnya penataan Kelembagaan Tani
Sarana Prasarana Penyuluhan	- Belum Optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan	- Program Penyuluh	- Terbatasnya Anggaran	- Belum Optimalnya alokasi anggaran Pusat dan Provinsi untuk memfasilitasi sarana dan prasarana penyuluhan	- Belum optimalnya pelayanan penyuluhan kepada masyarakat tani/petani
Penyelenggaraan Penyuluhan	- Masih rendahnya penerapan teknologi tepat guna oleh petani	- Program Penyuluhan	- Terbatasnya anggaran penyelenggaraan penyuluhan  - Terbatasnya Ketenagaan Penyuluhan	- Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petani  - Masih lemahnya motivasi petani untuk menerapkan teknologi baru  - Belum Optimalnya jumlah petani yang menjadi anggota kelompok tani	- Belum optimalnya proses diseminasi teknologi kepada petani

**3.5.1. Strategis yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang antara lain dengan :**

- a. Mengintegrasikan program kegiatan ketahanan pangan yang meliputi sub system ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dalam rangka mendukung percepatan penganekaragaman pangan ;
- b. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan pangan berbasis potensi pangan local ;
- c. Mengembangkan kelembagaan Ketahanan Pangan dan peningkatan sumber daya aparatur dalam upaya pembinaan kepada petani/peserta pada desa mandiri pangan.
- d. Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis potensi lokal.

**3.5.2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman antara lain dengan:**

1. Meningkatkan pemberdayaan aparatur ketahanan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas, gabungan kelompok tani, kelompok tani sebagai kemitraan pelaksanaan P-LDPM, LAPM, dan PUPM/TTI dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bertumpu pada sumber daya lokal.
2. Meningkatkan fasilitas petugas ketahanan pangan dalam sosialisasi pola konsumsi pangan yang memenuhi azas B2SA, terutama yang berbasis potensi lokal.
3. Menjaga stabilitas harga pangan.

**3.5.3. Strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang antara lain :**

1. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan ketahanan pangan dan informasi yang terbaru.
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur guna mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga berbasis pangan lokal.
3. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dan pihak swasta dalam integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

4. Memfasilitasi permodalan petani.
5. Mendorong terwujudnya kemandirian pangan masyarakat.

**3.5.4. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman antara lain dengan :**

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian penghasil pangan olahan dan pangan alternatif.
2. Memanfaatkan media informasi untuk mendukung ketahanan pangan pemasyarakatan melalui produk pangan dalam negeri/pangan lokal.
3. Melakukan kampanye dan promosi tentang pola konsumsi dan diversifikasi pangan secara terus menerus melalui berbagai media.
4. Mengembangkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
5. Membangun cadangan pangan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu factor kunci dalam pembangunan suatu bangsa. Setidaknya ada tiga isu strategis yang terkait dengan ketahanan pangan yaitu :
  - 1) Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu;
  - 2) Pangan merupakan basis bagi pengembangan sumberdaya manusia berkualitas, baik dalam arti biologis maupun intelektual;

Pemantapan kebutuhan pangan merupakan basis pembangunan ekonomi, dan kebutuhan nasional bagi suatu negara yang berdaulat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan**

Berdasarkan visi dan misi di atas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis pada RPJMD 2016 - 2021 pada tabel berikut :

##### **4.1.1. Tujuan**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, dalam Menanggulangi kejadian rawan pangan transien dan kronis.
2. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian.
3. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan.

##### **4.1.2. Sasaran**

Untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

1. Terantisipasi kejadian rawan pangan secara dini, serta tertanggulangnya kejadian rawan pangan transien dan kronis.
2. Tertanggulangnya masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat di wilayah Kabupaten Sukabumi dengan mengutamakan produksi para petani local.

3. Terpenuhiya kebutuhan pangan dan gizi serta terjaminnya keamanan pangan sehari-hari berdasarkan B2SA di masyarakat.
4. Terpenuhiya kebutuhan pangan di masyarakat dengan harga terjangkau dalam penyediaan bahan pangan di masyarakat.
5. Terciptanya Kesempatan kerja di sektor agribisnis.
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi lokal.
7. Meningkatnya produksi pertanian non pangan.

Tabel 4.1 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 1 RPJMD 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
1	Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian	Terciptanya Kesempatan kerja di sektor agribisnis	Meningkatkan kesempatan kerja di sektor pertanian melalui pengolahan produksi pemasaran hasil pertanian, dan pengembangan usaha agribisnis melalui kelompok tani
		Meningkatnya Produksi Pangan	Meningkatkan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan
		Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan Serta Teratasinya kerawanan pangan	Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan
		Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan dan	Mengembangkan Sentra Agribisnis berbasis Kawasan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3	4
		Peternakan	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi lokal	Menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan tani sebagai kekuatan ekonomi petani
		Meningkatnya Produksi Pertanian Non Pangan	Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian non pangan
	Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelaku perikanan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku perikanan
		Terwujudnya sentra perikanan budidaya air tawar, laut, dan pengolahan hasil perikanan	Mengembangkan Sentra Perikanan berbasis Kawasan

## 4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan

### 4.2.1 Strategi Dinas Ketahanan Pangan

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi adalah :

1. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai.
2. Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi



pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.

3. Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual, pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan.
4. Peningkatan skor PPH Ketersediaan dengan peningkatan produksi 9 kelompok bahan pangan.
5. Sertifikasi prima serta keamanan bahan pangan pedagang dan jajanan anak sekolah.
6. Meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan Lembaga distribusi dan lembaga akses serta pengembangan usaha komoditas pangan yang terjangkau oleh masyarakat.
7. Meningkatkan kesempatan kerja di sektor pertanian melalui pengolahan produksi pemasaran hasil pertanian, dan pengembangan usaha agribisnis melalui kelompok tani.
8. Menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan tani sebagai kekuatan ekonomi petani.
9. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian non pangan.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku perikanan.
11. Mengembangkan Sentra Perikanan berbasis Kawasan.

#### **4.2.2. Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan**

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
2. Implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis.
3. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
4. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (CPPD) Kabupaten Sukabumi.
5. Penumbuhan wirausahawan baru di sektor pertanian.

6. Penumbuhan kelompok tani baru.
7. Optimalisasi peran kelembagaan petani sebagai lembaga keuangan.
8. Penumbuhan dan pengembangan ekonomi petani melalui kelembagaan tani.
9. Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi komoditi pertanian non pangan.
10. Meningkatkan adopsi teknologi pertanian.

#### **4.2.3. Fakta Integritas Skala Prioritas Dinas Ketahanan Pangan**

- 1) Mengawasi Penyaluran Raskin;
- 2) Mengentaskan Desa Rentan Pangan 87 Desa;
- 3) Merealisasikan Desa Mandiri Pangan terutama pada kawasan/desa sentra padi;
- 4) Meningkatkan produktifitas petani melalui implementasi teknologi pertanian tepat guna di 47 kecamatan;
- 5) Menyelenggarakan perlombaan antar Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendukung peningkatan produktifitas;
- 6) Membangun kawasan Rumah Pangan Lestari (RPL) di Kawasan Geopark Ciletuh.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**5.1 Program Dinas Ketahanan Pangan**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dengan tetap mengacu kepada program pembangunan program yang tertuang dalam rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi 2016-2021.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan mengacu Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi, maka dalam melaksanakan tugas sehari-hari telah menetapkan 5 (lima) program pendukung bersifat rutin dan 4 (empat) program utama, komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi D Kabupaten Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis terlihat pada table 5.1.

Tabel 5. 1. Komponen program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok fungsi

<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>	<b>PROGRAM UTAMA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</li> <li>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</li> <li>3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</li> <li>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</li> <li>5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan</li> <li>2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</li> </ol>

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, pembangunan propinsi Jawa Barat dan Pembangunan Kabupaten Sukabumi, Dinas Ketahanan Pangan akan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) target utama yaitu: (1) Peningkatan Ketahanan Pangan (2) Peningkatan produktivitas komoditi pertanian, perikanan dan kehutanan; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) Peningkatan kemandirian petani (5) peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya target tersebut akan menjadi pedoman bagi Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dalam menetapkan sasaran pembangunan pertanian di tingkat desa dan kecamatan yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir dan dengan tekad kerja keras, kita optimis bahwa target tersebut dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor pengungkit keberhasilan.

Kerjasama antar pelaku pembangunan pertanian sangat dibutuhkan, Karena pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan masalah kompleks, hingga membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang membidangi SDM pertanian, namun memerlukan

koordinasi dengan SKPD lingkup ekonomi lainnya. Oleh karena itu penanganan pembangunan pertanian mau tidak mau membutuhkan kerja sama dari sector lain, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasinya di lapangan.

#### **5.5.1. Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Indikatif**

Sumber pendaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan masih berasal dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi mendapat dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah berupa dana desentralisasi (APBD) dan APBN berupa dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan (TP).

#### **5.5.2. Arah Kebijakan Belanja SKPD**

Kebijakan belanja pada Dinas Ketahanan Pangan untuk anggaran desentralisasi (APBD) digunakan mulai untuk belanja pegawai berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang masuk dalam kelompok belanja tidak langsung.

Sedangkan untuk belanja langsung digunakan untuk pembiayaan keperluan rutin kantor berupa biaya pemeliharaan dan jasa. Selain itu belanja langsung digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran program.

Untuk dana dekonsentrasi kebijakan dalam pemanfaatan anggaran seluruhnya digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan saran program peningkatan ketahanan pangan di daerah.

### **5.2. Pendanaan Indikatif**

Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA - PD) berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2016 s/d 2021, jumlah biaya/dana yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan**

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
DINAS KETAHANAN PANGAN															
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	662	100%	729	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500
02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100%	100%	9	100%	10	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
02.01	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	9	100%	10	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	380	100%	380	100%	530	100%	530	100%	530	100%	530
03.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	10 Exp	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	10 Exp	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
03.03	Monitoring dan Evaluasi	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	47 Kec.	100%	100	100%	100	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150
03.04	Pengembangan dan Pengelolaan Website Dinas Ketahanan Pangan	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
03.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	10 Exp	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80
<b>04</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.670</b>	<b>100%</b>	<b>4.670</b>	<b>100%</b>	<b>5.270</b>	<b>100%</b>	<b>5.270</b>	<b>100%</b>	<b>5.270</b>	<b>100%</b>	<b>5.270</b>
04.01	Pemagaran Kantor BP3K	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	2 unit	200	2 unit	200	2 unit	200	2 unit	200

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.02	Pembangunan Ruang Rapat BP3K (PIK)	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	2 unit	400	2 unit	400	2 unit	400	2 unit	400
04.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	8 Unit	8 unit	30	8 unit	30	8 unit	30	8 unit	30	8 unit	30	8 unit	30
04.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1 Unit	1 unit	75	1 unit	75	1 unit	75	1 unit	75	1 unit	75	1 unit	75
04.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300
04.06	Pengadaan Perangkat Komputer	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana	10 unit	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100



No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Aparatur														
04.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	50
04.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	50
04.09	Pengadaan Mebeulair	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	10%	100	100
04.10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	10%	100	100
04.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	10%	100	100

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Prasarana Aparatur														
04.12	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	3.765	100%	3.765	100%	3.765	100%	3.765	100%	3.765	100%	3.765	
04.13	Pengadaan Tanah untuk Kantor Penyuluh Pertanian	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	-	-	-	-	100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>Menurunkan Jumlah Desa Rentan Pangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.200</b>	<b>100%</b>	<b>12.200</b>	<b>100%</b>	<b>22.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.500</b>	<b>100%</b>	<b>21.500</b>	<b>100%</b>	<b>21.500</b>	
05.01	Gudang Distribusi Pangan	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	-	-	-	-	-	3 unit	7.500	3 unit	7.500	3 unit	7.500	3 unit	7.500	
05.02	Dewan Ketahanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	300	100%	300	100%	500	100%	500	100%	500	100%	500	
05.03	Monitoring dan	Distribusi dan	386	386	700	386	700	386	700	386	700	386	700	386	700	

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Evaluasi Penyaluran Raskin	Akses Pangan	desa/k el.	desa/k el.		desa/kel.		desa/kel		desa/kel.		desa/kel		desa/kel	
05.04	Pembangunan Lumbung Pangan	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	87 desa	7 desa	350	16 desa	800	16 desa	800	16 desa	800	16 desa	800	16 desa	800
05.05	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Penanganan Kerawanan Pangan	87 desa	7 desa	700	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600
05.06	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Distribusi dan Akses Pangan	5 desa	5 desa	250	5 desa	250	5 desa	250	5 desa	250	5 desa	250	5 desa	250
05.07	Peningkatan Ketahanan Pangan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	87 desa	7 desa	700	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600
05.08	Analisis PPH Konsumsi Pangan	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	47 kec.	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100
05.09	Gerakan Keamanan Pangan Desa	Penganekaragaman dan Keamanan	47 kec.	47 kec.	700	47 kec.	700	47 kec.	700	47 kec.	700	47 kec.	700	47 kec.	700

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pangan														
05.10	Analisis Akses Pangan	Distribusi dan Akses Pangan	5 kec.	5 kec.	350	5 kec.	350	5 kec.	350	5 kec.	350	5 kec.	350	5 kec.	350	
05.11	Analisis FSVA	Penanganan Kerawanan Pangan	87 desa	7 desa	150	16 desa	300	16 desa	300	16 desa	300	16 desa	300	16 desa	300	
05.12	Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	Penanganan Kerawanan Pangan	10 desa	10 desa	500	10 desa	500	10 desa	500	10 desa	500	10 desa	500	10 desa	500	
05.13	Lembaga Akses Pangan Masyarakat	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	6 desa	6 desa	300	6 desa	300	6 desa	300	6 desa	300	6 desa	300	6 desa	300	
05.14	Pemantauan Harga Pangan	Distribusi dan Akses Pangan	7 pasar	7 pasar	350	7 pasar	350	7 pasar	350	7 pasar	350	7 pasar	350	7 pasar	350	
05.15	Pendampingan LDPM	Distribusi dan Akses Pangan	11 kel.	11 kel.	200	11 kel.	200	11 kel.	200	11 kel.	200	11 kel.	200	11 kel.	200	
05.16	Implementasi GIAHS-NIAHS	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	3 adat	3 adat	150	3 adat	150	3 adat	150	3 adat	150	3 adat	150	3 adat	150	
05.17	Kawasan Mandiri Pangan (KMP)	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	5 desa	5 desa	1.000	5 desa	1.000	5 desa	1.000	5 desa	1.000	5 desa	1.000	5 desa	1.000	

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.18	Bulan Keamanan Pangan Tingkat Kabupaten	Penganekarag aman dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	47 kec.	450	47 kec.	450	47 kec.	450	47 kec.	450
05.19	Jambore Keamanan Pangan Remaja/Pengurus OSIS	Penganekarag aman dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	8 kec.	550	8 kec.	550	8 kec.	550	8 kec.	550
05.20	Pengadaan Mobil Keliling Laboratorium Pengujian Keamanan Pangan	Penganekarag aman dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	1 unit	500	-	-	-	-	-	-
05.21	Pengembangan Produk Prima 3	Penganekarag aman dan Keamanan Pangan	47 kec.	47 kec.	600	47 kec.	600	47 kec.	600	47 kec.	600	47 kec.	600	47 kec.	600
05.22	Pendampingan Lumbung Pangan	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	24 kel.	24 kel.	250	24 kel.	250	24 kel.	250	24 kel.	250	24 kel.	250	24 kel.	250
05.23	Pendampingan PUPM	Distribusi dan Akses Pangan	6 kel.	6 kel.	100	6 kel.	100	6 kel.	100	6 kel.	100	6 kel.	100	6 kel.	100
05.24	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	60 ton	60 ton	750	60 ton	1.000	60 ton	1.000	60 ton	1.000	60 ton	1.000	60 ton	1.000

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.25	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	2 keg.	2 keg.	200	2 keg.	200	2 keg.	200	2 keg.	200	2 keg.	200	2 keg.	200
05.26	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350
05.27	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Penanganan Kerawanan Pangan	386 desa	386 desa	200	386 desa	200	386 desa	200	386 desa	200	386 desa	200	386 desa	200
05.28	Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	47 kec.	47 kec.	350	47 kec.	350	47 kec.	350	47 kec.	350	47 kec.	350	47 kec.	350
<b>06</b>	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Petani yang menjadi anggota Kelompok Tani</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.171</b>	<b>100%</b>	<b>12.171</b>	<b>100%</b>	<b>12.171</b>	<b>100%</b>	<b>12.171</b>	<b>100%</b>	<b>12.171</b>	<b>100%</b>	<b>12.171</b>
06.01	Penataan Kelembagaan Tani	Jumlah Petani yang baru bergabung di kelompok tani	47 kec.	47 kec.	500	47 kec.	500	47 kec.	500	47 kec.	500	47 kec.	500	47 kec.	500
06.02	Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat	Jumlah Teknologi	47 kec.	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Guna	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna														
06.03	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Tekhnologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	47 kec.	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	
06.04	Biaya Operasional Penyuluh (BOP)	Jumlah Tekhnologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	47 kec.	47 kec.	474	47 kec.	474	47 kec.	474	47 kec.	474	47 kec.	474	47 kec.	474	
06.05	Implementasi Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	47 kec.	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	
06.06	Pelayanan Penyuluhan	Jumlah	47	47 kec.	970	47 kec.	970	47 kec.	970	47 kec.	970	47 kec.	970	47 kec.	970	

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pertanian	Tekhnologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	kec.													
06.07	Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Jumlah Gabungan Tani (Gapoktan)	47 kec.	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	
06.08	Pengelolaan Ketenagaan Penyuluh (PKP)	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	47 kec.	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	
06.09	Perkembangan Jejaring Kerjasama Penyuluhan	Jumlah Tekhnologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	47 kec.	47 kec.	650	47 kec.	650	47 kec.	650	47 kec.	650	47 kec.	650	47 kec.	650	
06.10	Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes)	Jumlah Gabungan Kelompok Tani	47 kec.	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	



No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		(Gapoktan)														
06.11	Reflikasi FMA	Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	16 desa	16 desa	505	16 desa	505	16 desa	505	16 desa	505	16 desa	505	16 desa	505	

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA RPJMD

Mengacu kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran yang harus dicapai. Sebagai tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Penjabaran
1	Penanganan Kerawanan Pangan	Menurunkan Jumlah Desa Rentan Pangan
2	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan 9 bahan pangan yang dihitung dalam PPH ketersediaan. Cadangan Pangan yang harus disediakan oleh pemerintah dan di masyarakat sesuai dengan UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 27
3	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi harga, distribusi dan pasokan sebagai langkah awal “Early Warning Detecting System” Stabilitas harga bahan pangan strategis menjadi rumusan kebijakan oleh pemangku sehingga masyarakat dapat memperoleh dengan harga murah dan terjangkau.
4	Penganekaragaman dan Kerawanan Pangan	Permentan No.65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pangan dan PPH konsumsi untuk memenuhi konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal serta terbebasnya komoditi pangan segar seperti buah dan sayuran dari residu kimia.
5	Kelembagaan Petani	Pembinaan Administrasi Kelembagaan Tani
6	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Pembinaan Gapoktan
7	Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	Penumbuhan dan Pembinaan P4S
8	Jumlah Koperasi Pertanian (KOPTAN)	Pembinaan Kelembagaan Tani dalam pembentukan Koptan
9	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Penumbuhan dan Pembinaan 175 LKM, Monitoring 175 Gapoktan Penerima PUAP Tahun 2008 s.d 2014
10	Jumlah Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	-

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 Untuk Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja Sesuai RPJMD	Satuan	Kondisi Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahunnya						Kondisi Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penanganan Kerawanan Pangan	Desa	87	7	16	16	16	16	16	87
2	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	%	93,3	95,3	98,3	99,0	100	100	100	100
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	%	79,6	80	82	85	86	88	89	89
4	Distribusi dan Akses Pangan	Desa	80	5	5	5	5	5	5	30
5	Kelembagaan Tani	Kelompok	3806	775	760	760	760	760	760	4.575
6	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Gapoktan	350	25	25	25	25	25	25	150
7	Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan	Unit	14	3	3	3	3	3	3	18

	Swadaya (P4S)									
8	Jumlah Koperasi Pertanian (Koptan)	Unit	18	8	8	8	8	8	8	48
9	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Unit	106	25	25	25	25	25	25	150
10	Jumlah Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	Teknologi	211	100	100	100	100	100	100	600

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelola pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Khususnya di Kabupaten Sukabumi dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan dari tahun (2016-2021).

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Daerah, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

Sukabumi,        Desember 2016

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SUKABUMI**

**Ir.H.SUDRAJAT, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620422 198803 1 006

**Tabel 5.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan**

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>															
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	662	100%	729	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500
02	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100%	100%	9	100%	10	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
02.01	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	9	100%	10	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	380	100%	380	100%	530	100%	530	100%	530	100%	530
03.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	10 Exp	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	10 Exp	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
03.03	Monitoring dan Evaluasi	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	47 Kec.	100%	100	100%	100	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150
03.04	Pengembangan dan Pengelolaan Website Dinas Ketahanan Pangan	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	100%	-	-	-	-	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100
03.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan	Cakupan Pengelolaan Laporan SKPD	10 Exp	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80	100%	80
<b>04</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.670</b>	<b>100%</b>	<b>4.670</b>	<b>100%</b>	<b>5.270</b>	<b>100%</b>	<b>5.270</b>	<b>100%</b>	<b>5.270</b>	<b>100%</b>	<b>5.270</b>
04.01	Pemagaran Kantor BP3K	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	2 unit	200	2 unit	200	2 unit	200	2 unit	200

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.02	Pembangunan Ruang Rapat BP3K (PIK)	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	2 unit	400	2 unit	400	2 unit	400	2 unit	400
04.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala AC	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	8 Unit	8 unit	30	8 unit	30	8 unit	30	8 unit	30	8 unit	30	8 unit	30
04.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1 Unit	1 unit	75	1 unit	75	1 unit	75	1 unit	75	1 unit	75	1 unit	75
04.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300
04.06	Pengadaan Perangkat Komputer	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana	10 unit	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100	10 unit	100



No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Aparatur														
04.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	50
04.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	50
04.09	Pengadaan Mebeulair	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	10%	100	100
04.10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	10%	100	100

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	10%	100
04.12	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	3.765	100%	3.765	100%	3.765	100%	3.765	100%	3.765	100%	3.765
04.13	Pengadaan Tanah untuk Kantor Penyuluh Pertanian	Cakupan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100%	-	-	-	-	100%	250	100%	250	100%	250	100%	250
<b>05</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>Menurunkan Jumlah Desa Rentan Pangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.200</b>	<b>100%</b>	<b>12.200</b>	<b>100%</b>	<b>22.000</b>	<b>100%</b>	<b>21.500</b>	<b>100%</b>	<b>21.500</b>	<b>100%</b>	<b>21.500</b>
05.01	Gudang Distribusi Pangan	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	-	-	-	-	-	3 unit	7.500	3 unit	7.500	3 unit	7.500	3 unit	7.500

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.02	Dewan Ketahanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300	100%	300
05.03	Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Raskin	Distribusi dan Akses Pangan	386 desa/kel.	386 desa/kel.	700	386 desa/kel.	700	386 desa/kel.	700	386 desa/kel.	700	386 desa/kel.	700	386 desa/kel.	700
05.04	Pembangunan Lumbung Pangan	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	87 desa	7 desa	350	16 desa	800	16 desa	800	16 desa	800	16 desa	800	16 desa	800
05.05	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Penanganan Kerawanan Pangan	87 desa	7 desa	700	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600
05.06	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Distribusi dan Akses Pangan	5 desa	5 desa	250	5 desa	250	5 desa	250	5 desa	250	5 desa	250	5 desa	250
05.07	Peningkatan Ketahanan Pangan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	87 desa	7 desa	700	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600	16 desa	1.600
05.08	Analisis PPH Konsumsi Pangan	Penganekaragaman dan Keamanan	47 kec.	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100	47 kec.	1.100

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Pangan														
05.09	Gerakan Keamanan Pangan Desa	Penganekarag aman dan Keamanan Pangan	47 kec.	47 kec.	700	47 kec.	700	47 kec.	700	47 kec.	700	47 kec.	700	47 kec.	700	
05.10	Analisis Akses Pangan	Distribusi dan Akses Pangan	5 kec.	5 kec.	350	5 kec.	350	5 kec.	350	5 kec.	350	5 kec.	350	5 kec.	350	
05.11	Analisis FSVA	Penanganan Kerawanan Pangan	87 desa	7 desa	150	16 desa	300	16 desa	300	16 desa	300	16 desa	300	16 desa	300	
05.12	Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)	Penanganan Kerawanan Pangan	10 desa	10 desa	500	10 desa	500	10 desa	500	10 desa	500	10 desa	500	10 desa	500	
05.13	Lembaga Akses Pangan Masyarakat	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	6 desa	6 desa	300	6 desa	300	6 desa	300	6 desa	300	6 desa	300	6 desa	300	
05.14	Pemantauan Harga Pangan	Distribusi dan Akses Pangan	7 pasar	7 pasar	350	7 pasar	350	7 pasar	350	7 pasar	350	7 pasar	350	7 pasar	350	
05.15	Pendampingan LDPM	Distribusi dan Akses Pangan	11 kel.	11 kel.	200	11 kel.	200	11 kel.	200	11 kel.	200	11 kel.	200	11 kel.	200	
05.16	Implementasi GIAHS-NIAHS	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	3 adat	3 adat	150	3 adat	150	3 adat	150	3 adat	150	3 adat	150	3 adat	150	

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.17	Kawasan Mandiri Pangan (KMP)	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	5 desa	5 desa	1.000	5 desa	1.000	5 desa	1.000	5 desa	1.000	5 desa	1.000	5 desa	1.000
05.18	Bulan Keamanan Pangan Tingkat Kabupaten	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	47 kec.	450	47 kec.	450	47 kec.	450	47 kec.	450
05.19	Jambore Keamanan Pangan Remaja/Pengurus OSIS	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	8 kec.	550	8 kec.	550	8 kec.	550	8 kec.	550
05.20	Pengadaan Mobil Keliling Laboratorium Pengujian Keamanan Pangan	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	-	1 unit	500	-	-	-	-	-	-
05.21	Pengembangan Produk Prima 3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	47 kec.	47 kec.	600	47 kec.	600	47 kec.	600	47 kec.	600	47 kec.	600	47 kec.	600
05.22	Pendampingan Lumbung Pangan	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	24 kel.	24 kel.	250	24 kel.	250	24 kel.	250	24 kel.	250	24 kel.	250	24 kel.	250

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.23	Pendampingan PUPM	Distribusi dan Akses Pangan	6 kel.	6 kel.	100	6 kel.	100	6 kel.	100	6 kel.	100	6 kel.	100	6 kel.	100
05.24	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	60 ton	60	750	60	750	60	750	60	750	60	750	60	750
05.25	Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan	2 keg.	2 keg.	200	2 keg.	200	2 keg.	200	2 keg.	200	2 keg.	200	2 keg.	200
05.26	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350	100%	350
05.27	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Penanganan Kerawanan Pangan	386 desa	386 desa	200	386 desa	200	386 desa	200	386 desa	200	386 desa	200	386 desa	200
05.28	Penyusunan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	47 kec.	47 kec.	350	47 kec.	350	47 kec.	350	47 kec.	350	47 kec.	350	47 kec.	350
05.29	DED Gudang Distribusi Pangan	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	-	-	-	-	-	2 Unit	100	2 unit	100	2 unit	100	2 unit	100

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06	<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	<b>Petani yang menjadi anggota Kelompok Tani</b>	100%	100%	12.171	100%	12.171	100%	12.171	100%	12.171	100%	12.171	100%	12.171
06.01	Penataan Kelembagaan Tani	Jumlah Petani yang baru bergabung di kelompok tani	47 kec.	47 kec.	500	47 kec.	500	47 kec.	500	47 kec.	500	47 kec.	500	47 kec.	500
06.02	Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	47 kec.	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335	47 kec.	1.335
06.03	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Teknologi Pertanian, Perkebunan dan	47 kec.	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015	47 kec.	1.015

No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Peternakan Tepat Guna														
06.04	Biaya Operasional Penyuluh (BOP)	Jumlah Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	47 kec.	47 kec.	474	47 kec.	474	47 kec.	474	47 kec.	474	47 kec.	474	47 kec.	474	474
06.05	Implementasi Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	47 kec.	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	47 kec.	2.451	2.451
06.06	Pelayanan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	47 kec.	47 kec.	970	47 kec.	970	47 kec.	970	47 kec.	970	47 kec.	970	47 kec.	970	970
06.07	Pemberdayaan Kelembagaan Tani	Jumlah Gabungan Tani (Gapoktan)	47 kec.	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	47 kec.	1.371	1.371



No	Urusan,Org, Program & Kegiatan	Indikator Sasaran	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
				Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)	Target	Rp (jutaan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06.08	Pengelolaan Ketenagaan Penyuluh (PKP)	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	47 kec.	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500	47 kec.	1.500
06.09	Perkembangan Jejaring Kerjasama Penyuluhan	Jumlah Teknologi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Tepat Guna	47 kec.	47 kec.	650	47 kec.	650	47 kec.	650	47 kec.	650	47 kec.	650	47 kec.	650
06.10	Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes)	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	47 kec.	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400	47 kec.	1.400
06.11	Reflikasi FMA	Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)	16 desa	16 desa	505	16 desa	505	16 desa	505	16 desa	505	16 desa	505	16 desa	505